

RENCANA STRATEGIS 2016 -2021

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Cendana No. 61 Bengkulu
Telp. (0736) 21477 Fax. (0736) 21477

LEMBAR PENETAPAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk memenuhi salah satu amanat dalam undang-undang tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai Rencana Tahunan. Muatan yang tertuang dalam Renstra ini adalah menyesuaikan visi dan misi Gubernur terpilih dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.

Dengan telah disusunnya RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 diharapkan pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan dapat berjalan terarah dan terkoordinasi serta menjadi komitmen bersama sehingga akan dapat menjadi kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sesuai dengan fokus sasaran yang hendak dicapai.

RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 13 Oktober 2017

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bengkulu,

Ivan Syamsurizal, ST, MT
Pembina NIP. 19740528 200212 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021. Rencana Strategis OPD ini disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu 2016 – 2021 adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu kewajiban pemerintah pusat dan Pemerintah daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai Rencana Kerja Tahunan.

Dengan telah selesai disusunnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 - 2021 ini, diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat lebih terarah dan terfokus serta menjadi komitmen bersama dan mempermudah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapakan kritik dan saran yang membangun.

Bengkulu, 13 Oktober 2017

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bengkulu,



Ivan Syamsurizal, ST, MT
Pembina NIP. 19740528 200212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
LEMBAR PENETAPAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	4
2.2 Sumber Daya OPD	33
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	53
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	55
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	57
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	58
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	59
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	60
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	64
4.2 Strategi dan Kebijakan OPD	65
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1 Program	68
5.2 Kegiatan	69
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	83
BAB VII PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Keadaan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Menurut Jabatan dan Pendidikan Tahun 2015	34
2	Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2015	34
3	Perkembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015	34
4	Unit Usaha Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	35
5	Potensi dan Jumlah Tangkapan yang diPerbolehkan (JTB) Menurut Jenis Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572	36
6	Jumlah TPI/PPI dan Volume Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015.....	37
7	Jumlah Armada Penangkapan Menurut Jenisnya Berdasarkan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2015.....	37
8	Produksi Benih Perikanan Budidaya Air Tawar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015	38
9	Jumlah BBI, Kondisi, dan Status Kepemilikan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu di Provinsi Bengkulu	38
10	Luas Potensi, Luas Pemanfaatan Lahan, dan Peluang Pengembangan Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2014.....	39
11	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015	40
12	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Menurut Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015.....	40
13	Jenis Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015	41
14	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	43
15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan	

	Perikanan Provinsi Bengkulu	50
16	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	58
17	Analisis SWOT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	63
18	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	66
19	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	76
20	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ...	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Tabel 7.1	Rancangan Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021	86

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari pembangunan nasional, harus dilandasi keinginan untuk menangkap signal-signal positif dari perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal terutama terkait dengan dinamika permintaan, teknologi dan sumberdaya. Dalam hal ini penajaman peningkatan dan perluasan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan merupakan keharusan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan daya saing ekonomi Indonesia.

Berdasarkan kerangka berfikir strategis di atas, pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada hakekatnya adalah memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dengan memperhatikan keseimbangan, kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, agar secara nyata mampu menjadi kontributor utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, maju dan mandiri.

Berkenaan dengan hal di atas, maka disusun Rencana Strategis OPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu selama lima tahun untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Secara geografis Provinsi Bengkulu terletak antara 101°1' - 103°46' Bujur Timur dan 2°16' – 3°31' Lintang Selatan dan berdasarkan wilayah administrasi berbatasan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung.

Luas Wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 Ha atau 19.919,33 Km² (BPS, 2015). Secara administratif terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (Satu) Kota dengan luas wilayah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas wilayah darat 1.218,5 Km².
2. Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas wilayah darat 5.616,00 Km²;
3. Kabupaten Rejang Lebong dengan luas wilayah darat 1.506,80 Km²
4. Kota Bengkulu dengan luas wilayah darat 151,70 Km².
5. Kabupaten Muko-Muko dengan luas wilayah darat 4.143,70 Km².
6. Kabupaten Seluma dengan luas wilayah darat 2.461,50 Km².
7. Kabupaten Kaur dengan luas wilayah darat 2.547 Km².
8. Kabupaten Kepahyang dengan luas wilayah darat 713,10 Km²,
9. Kabupaten Lebong dengan luas wilayah darat 1.672,0 Km²;

10. Kabupaten Bengkulu Tengah dengan luas wilayah darat 1.223,94 Km².

(Sumber : Bakosurtanal, Download 21 April 2016)

Provinsi Bengkulu dengan panjang garis pantai 525 Km yang membentang ke arah laut lepas memiliki luas laut 10.080 Km² berpotensi untuk perikanan tangkap dan budidaya (payau dan laut). Potensi budidaya semakin besar jika dimanfaatkan pula keberadaan lahan dan perairan umum (tawar) yang cukup besar. Luas laut masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Bengkulu Selatan dengan panjang garis pantai 60 km memiliki luas wilayah laut 1.333,44 Km².
2. Kabupaten Bengkulu Utara dengan panjang garis pantai 245,23 km (termasuk P. Enggano dan P. Mega) memiliki luas wilayah laut 5.449,922 Km²;
3. Kota Bengkulu dengan panjang garis pantai 17,5 km memiliki luas wilayah laut 388,92 Km².
4. Kabupaten Muko-Muko dengan panjang garis pantai 98,22 km memiliki luas wilayah laut 2.182,841 Km².
5. Kabupaten Seluma dengan panjang garis pantai 76 km memiliki luas wilayah laut 1.689,024 Km².
6. Kabupaten Kaur dengan panjang garis pantai 106,6 km memiliki luas wilayah laut 2.369,078 Km².
7. Kabupaten Bengkulu Tengah dengan panjang garis pantai 21,8 km memiliki luas wilayah laut 484,483 Km².

(Sumber: Statistik KP3K DKP Provinsi Bengkulu)

1.2 Landasan Hukum

- i. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- ii. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- iii. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660).
- iv. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- v. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
 - vi. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 - vii. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - viii. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - ix. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.
 - x. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ini adalah untuk merumuskan dan menetapkan arah kebijakan strategi, tujuan serta indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyelenggarakan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan serta pelayanan terhadap *stake holder* sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Review Rencana Strategis adalah agar tugas tersebut diatas dapat berdayaguna dan berhasil guna sehingga visi dan misi sebagai pedoman pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN OPD
BAB	III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB	IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB	VI	INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB	VII	PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi.

Fungsi

Kaitan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor Nomor 42 Tahun 2016, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan.

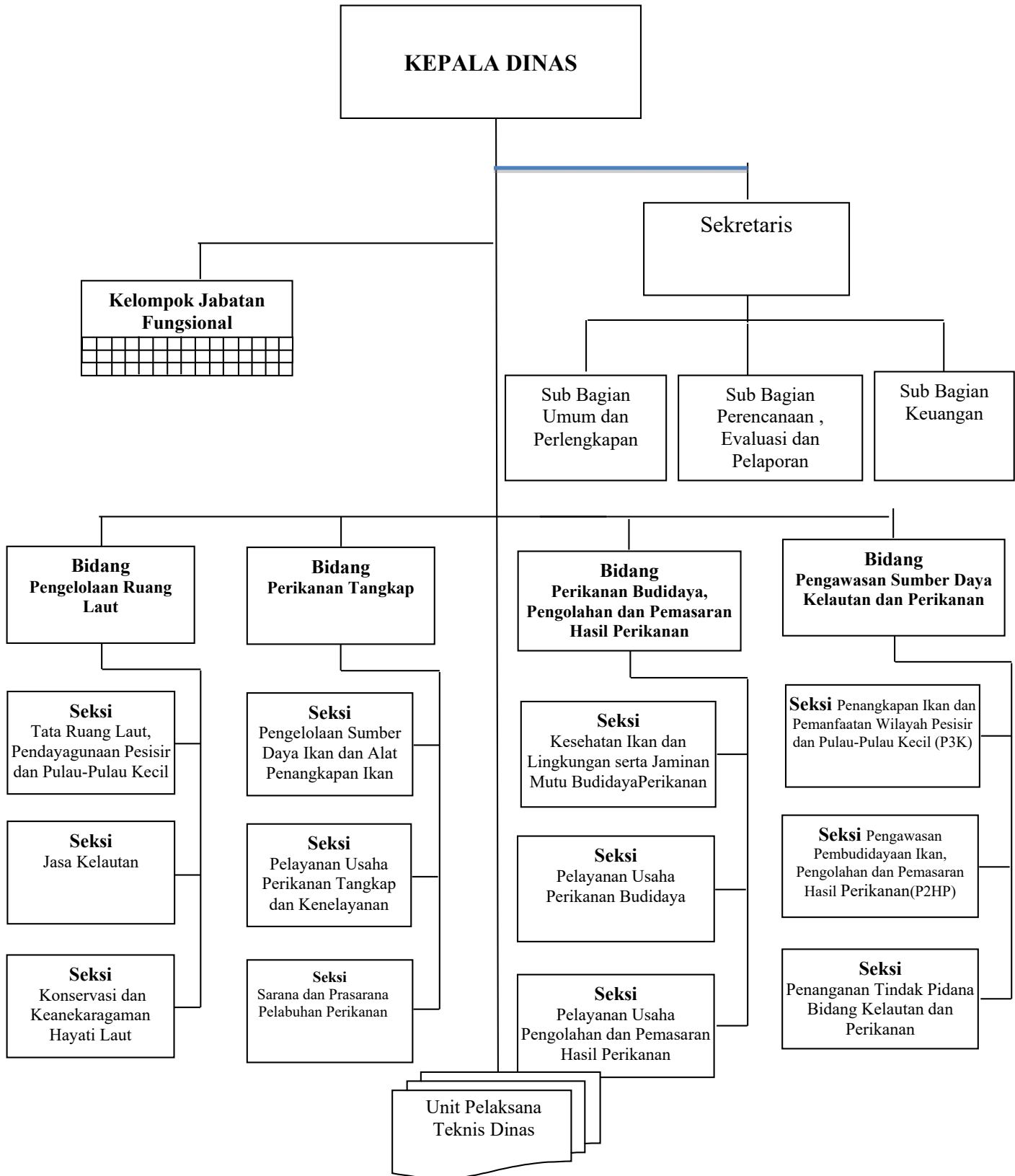
Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat
- C. Bidang Pengelolaan Ruang Laut
- D. Bidang Perikanan Tangkap
- E. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- F. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- G. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- H. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU



A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai **tugas** melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai 12 (dua belas) mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan dengan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas, dan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas membawahi :

B. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai **tugas** mengarahkan penyusunan program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisasi permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris menyelenggarakan **fungsi** :
 - a. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. Penyusunan rencana kerja program kerja dan anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - c. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan kelengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. Pengkoordinasian penyelenggara tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. Pelayanan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - f. Pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;
 - g. Pengkoordinasian dan pengidentifikasi permasalahan pada bidang-bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas;
 - i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri dari:

B.1 Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

B.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

B.3 Sub Bagian Keuangan;

B. 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai **tugas** mengelola administrasi Persuratan, Kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
 - f. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - h. Pengumpulan data dan informasi dari bidang teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - i. Pemutakhiran informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - j. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - k. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - l. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
 - m. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

B.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai **tugas** mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan laporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Perencanaan program per tahun anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. Pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. Penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dari bidang-bidang teknis;
 - e. Penginventarisasian potensi-potensi yang mendukung visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dari bidang-bidang teknis;
 - f. Penyusunan laporan inventarisir Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dari bidang-bidang teknis;
 - g. Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahun;
 - h. Menghadiri rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai dengan disposisi atasan;
 - i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

B.3 Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai **tugas** Mengelola Adminstrasi Keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- b. Pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan serta mengkoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Pengelolaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. Penatausahaan administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- f. Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Menghadiri Rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi atasan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan langsung atasan.

C. Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL)

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan, penerbitan izin, pemanfaatan ruang dan laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan menyusun laporan pengelolaan ruang laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 - c. Pelaksanaan fasilitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan, penerbitan izin dan mafaat ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan penerbitan izin dan manfaat ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua Belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin dan manfaat ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. Menghadiri rapat teknis pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai 12 (dua Belas) mil, zonasi laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir, penerbitan izin serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Ruang Laut; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut membawahi:

C.1 Kepala Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K).

C.2 Kepala Seksi Jasa Kelautan.

C.3 Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

C.1 Kepala Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

- (1) Kepala Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai **tugas** melaksanakan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), rencana Aksi

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan **fungsi** :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Pengidentifikasian dan analisis berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Pelaksanaan kebijakan Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K); dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan disposisi atasan;

- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- j. Penyusunan laporan Seksi Tata Ruang Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

C.2 Kepala Seksi Jasa Kelautan.

- (1) Kepala Seksi Jasa Kelautan mempunyai **tugas** melaksanakan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Jasa Kelautan menyelenggarakan **fungsi** :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Jasa Kelautan;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Jasa Kelautan;
 - c. Pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
 - e. Penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
 - f. Pengevaluasian penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);

- g. Penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
- h. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sesuai disposisi atasan;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Jasa Laut;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Jasa Laut;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

C.3 Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

- (1) Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai **tugas** melaksanakan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; melaksanakan penataan batas kawasan konservasi; dan mengelola kawasan konservasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan **fungsi** :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
 - c. Pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi;
 - e. Pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi;

- f. Pengendalian pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi;
- h. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi; penerbitan dokumen rencana pengelolaan; zonasi kawasan konservasi; penataan batas kawasan konservasi; dan pengelolaan kawasan konservasi sesuai disposisi atasan;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

D. Bidang Perikanan Tangkap

- (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai **tugas** menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan **fungsi** :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap;
 - c. Pengumpulan data penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10

- (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan;
- d. Pengidentifikasi-an dan analisis penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan;
 - e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan;
 - f. Pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan;
 - g. Pengevaluasian pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan; evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10

- (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan;
- i. Menghadiri rapat teknis pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil; menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; menerbitkan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal ikan di atas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); dan menerbitkan buku kapal perikanan sesuai disposisi atasan;
 - j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap;
 - k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi:

- D.1 Kepala Seksi pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan;
- D.2 Kepala Seksi pelayanan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan; dan
- D.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

D.1 Kepala Seksi pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan

- (1) Kepala Seksi pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai **tugas** melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan; melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - c. Pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- f. Pengevaluasian pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan izin pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- h. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

D.2 Kepala Seksi Pelayanan usaha dan Kenelayanan

- (1) Kepala Seksi Pelayanan usaha dan Kenelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi; melaporkan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan; dan menerbitkan buku kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Pelayanan usaha dan Kenelayanan menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan usaha dan Kenelayanan;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan usaha dan Kenelayanan;
 - c. Pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan; dan menerbitkan buku kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT);
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan

- dan Kapal Pengangkut Ikan; dan menerbitkan buku kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT);
- e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan; dan menerbitkan buku kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT);
 - f. Pengevaluasian penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan; dan menerbitkan buku kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT);
 - g. Penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan; dan menerbitkan buku kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT);
 - h. Mengahdiri rapat teknis pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, Izin Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan; dan menerbitkan buku kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT);
 - i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan usaha dan Kenelayanan;
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan usaha dan Kenelayanan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

D.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan mempunyai **tugas** melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
- c. Pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. Penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis sarana dan prasarana pelabuhan perikanan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan;
- i. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai disposisi atasan;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

E. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

(1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai **tugas** melaksanakan pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan

kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Penyusunan rencana tugas pelaksanaan Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. Pengevaluasian pelaksanaan di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya serta peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan;
- g. Menghadiri rapat teknis di bidang pelayanan teknis, pembinaan, standarisasi pengembangan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, evaluasi serta penerbitan

- izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidaya ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai disposisi;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi:

- E.1 Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan;
- E.2 Kepala Seksi pelayanan Usaha Perikanan Budidaya; dan
- E.3 Kepala Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

E.1 Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan mempunyai **tugas**, merumuskan kebijakan teknis, penyusunan program, pembinaan dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta memonitor dampaknya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan;
 - b. Pelaksanaan analisis mutu perikanan;
 - c. Pengkajian dan analisis standar mutu perikanan hasil budidaya;
 - d. Pelaksanaan monitoring terhadap standar mutu perikanan hasil budidaya;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis kesehatan ikan dan lingkungan serta jaminan mutu;
 - f. Pelaksanaan analisis dampak lingkungan terhadap mutu hasil budidaya;
 - g. Menghadiri rapat teknis kesehatan ikan dan lingkungan serta jaminan mutu budidaya perikanan sesuai disposisi atasan;
 - h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan serta Jaminan Mutu Budidaya Perikanan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

E.2 Kepala Seksi pelayanan Usaha Perikanan Budidaya

- (1) Kepala Seksi pelayanan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai **tugas** melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya ikan ukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); menerbitkan IUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi pelayanan Usaha Perikanan Budidaya;
 - c. Pengidentifikasian dan analisis dalam pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya ikan ukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT);
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya ikan ukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT);
 - e. Perumusan kebijakan dibidang pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya ikan ukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); menerbitkan IUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya lintas kabupaten/kota;
 - f. Perumusan standar kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya ikan ukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (Tiga Puluh) Gross Tonnage (GT);
 - g. Pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya ikan ukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); menerbitkan IUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya lintas kabupaten/kota;
 - h. Pengevaluasian pelaksanaan penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya ikan ukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT); menerbitkan IUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya lintas kabupaten/kota;

- i. penyusunan laporan pelaksanaan perebitan surat izin kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidaya ikan ukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT);
- j. menghadiri rapat teknis yang berkenaan dengan pelayanan usaha perikanan budidaya berdasarkan disposisi atasan;
- k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

E.3 Kepala Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai **tugas** melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Pengidentifikasian dan analisis dalam pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - e. Pelaksanaan analisis dan perumuskan standar mutu pengolahan hasil perikanan;
 - f. Pemetaan wilayah pemasaran hasil perikanan;
 - g. Pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- h. Pengevaluasian pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, analisis perumusan standar mutu pengolahan hasil perikanan dan pemetaan wilayah pemasaran hasil perikanan;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, analisis perumusan standar mutu pengolahan hasil perikanan dan pemetaan wilayah pemasaran hasil perikanan;
- j. Menghadiri rapat teknis yang berkenaan dengan pelayanan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan disposisi atasan;
- k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

F. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan

- (1) Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai **tugas** melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyusunan rencana tugas pelaksanaan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - c. Pengidentifikasian dan analisis pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - f. Pengevaluasian pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- h. Menghadiri rapat teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil sesuai disposisi atasan;
- i. Pengevaluasian tugas pelaksanaan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- j. Penyusunan laporan tugas pelaksanaan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membawahi:

- F.1 Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P3K);
- F.2 Kepala Seksi Pengawasan Pembudidaya Ikan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP); dan
- F.3 Kepala Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan.

F.1 Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K)

- (1) Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) mempunyai **tugas**: melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas: Kepala Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K);
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K);
 - c. Pengidentifikasian dan analisis dalam pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;

- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;
- f. Pelaksanaan analisis perencanaan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan, perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan;
- i. Menghadiri rapat teknis pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penangkapan ikan berdasarkan disposisi atasan;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K);
- k. Penyusunan Laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K);
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

F.2 Kepala Seksi Pengawasan Pembudidaya Ikan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

- (1) Kepala Seksi Pengawasan Pembudidaya Ikan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) mempunyai **tugas** melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Pengawasan Pembudidaya Ikan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) menyelenggarakan **fungsi** :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pembudidaya Ikan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pembudidaya Ikan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Pengidentifikasian dan analisis dalam pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. Menghadiri rapat teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan disposisi atasan;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pembudidaya Ikan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Pembudidaya Ikan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

F.3 Kepala Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

- (1) Kepala Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai **tugas** melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan **fungsi**:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. Pengidentifikasian dan analisis dalam pelaksanaan pengawasan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
 - e. Penyusunan standar pengawasan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;

- f. Pelaksanaan pengawasan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan pengawasan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- j. Menghadiri rapat teknis tindak pidana bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan disposisi atasan;
- k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan;
- l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas:

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk pada Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

H. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DKP Provinsi Bengkulu tercantum dalam Peraturan Gubernur Bengkulu No. 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu.

I. Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar

- 1) Pelaksanaan penyusunan program pengembangan budidaya ikan air tawar.
- 2) Perumusan dan pengembangan Cara Budidaya yang Baik (CBIB).
- 3) Melaksanakan pembinaan dan dan bimbingan CBIB kepada pelaku budidaya ikan.
- 4) Pelaksanaan pelestarian dan pengembangan sarana budidaya air tawar serta pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan budidaya ikan air tawar.
- 6) Pelaksanaan pengembangan sistem jaringan informasi serta pembentukan basis data system informasi geografis.
- 7) Pelaksanaan pengembangan teknologi diversifikasi usaha pembenihan dan penyiapan calon induk ikan.
- 8) Pelaksanaan pendistribusian benih dan calon induk ikan.
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, dan keuangan
- 10) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan balai.
- 11) Pelaksanaan penyusunan program kerja dan penyampaian laporan kegiatan.

II. Balai Pelabuhan Perikanan Provinsi (BPP) Bengkulu

- 1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pelayanan kepada masyarakat perikanan
- 2) Pelaksanaan serta pengaturan tambat labuh, bongkar muat kapal ikan di pelabuhan khusus perikanan
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas Pelabuhan Perikanan
- 5) Pelaksanaan pengaturan teknis pelelangan ikan

- 6) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelepasan ikan dan retribusi jasa fasilitas pelabuhan perikanan
- 7) Pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinator pelabuhan khusus perikanan dibawahnya
- 8) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan serta pembinaan perkoperasian nelayan
- 9) Pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam upaya kelancaran pelaksanaan tugas
- 10) Pelaksanaan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, dan keuangan
- 11) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan balai
- 12) Pelaksanaan penyusunan program kerja dan penyampaian laporan kegiatan.

III. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)

- 1) Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan
- 2) Pelaksanaan pengaturan pengujian, pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas laboratorium
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas laboratorium
- 5) Pelaksanaan pemanfaatan pengaturan teknis pengujian kesehatan hasil perikanan
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinator pengendalian mutu hasil perikanan
- 7) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan berkaitan dengan standarisasi mutu hasil perikanan
- 8) Pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam upaya kelancaran pelaksanaan tugas
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, dan keuangan
- 10) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan balai
- 11) Pelaksanaan penyusunan program kerja dan penyampaian laporan kegiatan.

IV. Balai Benih Ikan Laut dan Pantai (BBILP)

Kepala BBILP bertugas melaksanakan penerapan teknik pembenihan budidaya air payau dan budidaya laut serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan di wilayah pesisir.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BBILP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih
- 2) Melaksanakan Pola Perbanyak Induk "Grand Parent Stock" (GPS) menjadi induk atau calon induk "Parent Stock" dan distribusi induk
- 3) Melaksanakan penerapan teknik pelestarian sumberdaya ikan serta teknik pengendalian hama dan penyakit

- 4) Melaksanakan tata laksana Pengendalian Mutu Benih melalui Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Mutu Benih
- 5) Melaksanakan tata laksana Pengawasan Mutu Benih
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan BBILP
- 7) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait

V. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL)

BPSPL mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemantauan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya BPSPL menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan evaluasi dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut serta ekosistemnya
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut, serta ekosistemnya
- 3) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir serta ekosistemnya
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan
- 5) Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi
- 6) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut
- 7) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendaagunaannya
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.2 Sumber Daya OPD

Gambaran umum keadaan sektor kelautan dan perikanan saat ini dapat dilihat dari sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana, serta potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, perbandingan alokasi dana dan serapan anggaran APBD.

Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya manusia yang tersedia sebanyak 118 orang

a. Strata 2	:	9	orang
b. Strata I / D.4	:	59	orang
c. Diploma 3	:	3	orang
d. Sekolah Lanjutan Atas	:	46	orang
e. Sekolah Lanjutan Pertama	:	0	orang
f. Sekolah Dasar	:	1	orang

Tabel 1. Keadaan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Menurut Jabatan dan Pendidikan Tahun 2016.

NO	Kualifikasi Pendidikan	Jml	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV					Jabatan Esselon						Pejabat fungsional		
									Pejabat Struktural																			
												II		III		IV												
			a	b	c	d	a	b	c	D	a	b	c	d	a	b	c	d	e	a	b	a	b	a	b			
1	SD	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	SLTP	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Fungsional Pengawas
3	SLTA	46	-	-	-	-	3	12	13	1	2	9	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8 Fungsional Penyuluh
4	D.1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	D.2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	D.3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
7	S.1/D.4	59	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	10	22	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	20
8	S.2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-
9	S.3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		118	1	0	0	0	3	12	13	1	10	25	17	27	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	29

Sumber : Subbag Umum dan Perlengkapan DKP Provinsi Bengkulu, 2016.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dikelompokkan atas 2 (dua) sumber dana, yaitu APBN dan APBD. Jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBN Tahun 2015.

No.	Jenis	Dana DK (Unit)						Dana TP (Unit)			Jumlah
		Satker						Satker			
		01	03	04	05	06	07	03	04	06	
1	Gol. Peralatan dan Mesin	5	864	530	211	6059	28	1	111		7.809
2	Gol. Gedung dan Bangunan		66	145		6		2	12		231
3	Gol. Jalan dan Jembatan (M2)		3001					391			3.392
4	Gol. Irigasi		8	30				1	4		43
5	Gol. Jaringan		1	5		2				1	9
6	Gol. Aset Tetap yang tidak digunakan			5							5
7	Gol. Aset Tetap dalam Renovasi					1					1

Sumber: Subbag Umum dan Perlengkapan DKP Provinsi Bengkulu, 2015.

Tabel 3. Perkembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Sumber Dana APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015.

No.	Jenis	APBD (unit)	
		2014	2015
1	Gol. Tanah		
-	Tanah (Bidang)	13	-
2	Gol. Peralatan dan Mesin		
-	Alat-alat besar	5	5
-	Alat-alat angkutan	16	18
-	Alat bengkel dan alat ukur	2	2
-	Alat pertanian	8	36
-	Alat kantor dan rumah tangga	304	326
-	Alat studio dan alat komunikasi	7	27
-	Alat-alat kedokteran	0	1
-	Alat laboratorium	4	22
-	Alat-alat persenjataan	0	0
3	Gol. Gedung dan Pembangunan		
-	Bangunan Gedung	46	64
-	Rumah Dinas	0	0
4	Gol. Jalan, Irigasi, dan Jembatan		
-	Jalan dan jembatan	2	6
-	Bangunan air / irigasi	3	3
-	Instalasi	0	0
-	Jaringan	0	0
5	Gol. Asset Tetap Lainnya		
-	Buku dan perpustakaan	8	0
-	Barang bercorak kebudayaan	3	0
-	Hewan dan ternak serta tanaman	1	0
-	Rehab Bangunan Gedung dan lahan	0	3
Jumlah		422	513

Sumber: Subbag Umum dan Perlengkapan DKP Provinsi Bengkulu, 2015.

Unit Usaha Yang Masih Operasional

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu memiliki 5 (Lima) Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang dalam operasionalnya selain memberikan pelayanan kepada stakeholder juga memberikan masukan Pendapatan Asli Daerah yang berpedoman pada

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan kepelabuhan
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu

UPTD yang memiliki unit usaha yang masih operasional lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Unit Usaha Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

No	Bidang Kerjasama	Nama Kegiatan Kerjasama	Dasar Hukum	Lama Kerjasama (Tanggal)			Output Kerjasama
				Lama	Mulai	Berakhir	
1	P2HP	Pemanfaatan Cold Storage	- Permendagri No. 17 Th. 2007 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	10 tahun	01 Mei 2013	01 Mei 2023	PAD, Pemanfaatan saat hasil tangkap tinggi
2	P2HP	Pengelolaan Pujaseri (Pusat Jajanan Serba Ikan)	- Permendagri No. 17 Th. 2007 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	1 tahun (berkelanjutan)	Januari	Desember	PAD, Pemanfaatan Pujaseri

Sumber: Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2015

Bentuk pelayanan publik yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu berkaitan dengan Perda tersebut di atas antara lain:

- Perizinan kapal ikan 5-30 GT yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)
- Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) yang diterbitkan oleh UPTD LPPMHP
- Surat Persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Provinsi Bengkulu

Potensi Kelautan dan Perikanan

Potensi, tingkat pemanfaatan dan peluang pengembangan usaha Perikanan Tangkap di Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari potensi perikanan yang terdapat di Wilayah Pengelolaan Perikanan 572 yang meliputi 6 (Enam) provinsi, terdiri dari: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung dan Banten. Potensi berkaitan dengan Jumlah Tangkapan yang diPerbolehkan (JTB) ini dapat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Potensi dan Jumlah Tangkapan yang diPerbolehkan (JTB) Menurut Jenis Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572

No.	Jenis Ikan	Potensi (Ton/Th)	JTB (Ton/TH)
1.	Ikan Pelagis Besar*	25.227	20.182
2.	Ikan Pelagis kecil	240.927	192.742
3.	Ikan Demersal	349.704	279.763
4.	Ikan Karang Konsumsi	45.118	36.095
5.	Udang Penaeid	7.979	6.383
6.	Lobster (Panulirus sp)	1.337	1.070
7.	Cumi-cumi	4.340	3.472
8.	Ikan Tongkol	42.667	34.134
		717.299	

Sumber: Komnaskajiskan, 2013.

Perikanan Tangkap di Provinsi Bengkulu meliputi kegiatan Penangkapan di Laut dan Penangkapan di Perairan Umum (terdiri dari: sungai, danau, waduk, dan rawa). Produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebesar 64.059,90 ton. Jumlah PPI/TPI dan volume produksi perikanan tangkap berdasarkan kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Jumlah PPI/TPI dan Volume Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPI / PPI	Kegiatan Penangkapan	
			Penangkapan di Laut (ton)	Penangkapan di Per.Umum (ton)
1	Bengkulu Selatan	1	1.905,10	56,7
2	Rejang Lebong	6	-	103,8
3	Bengkulu Utara	3	5.930,00	182,8
4	Kaur	-	2941,6	275,5
5	Seluma	-	1771,5	236,5
6	Mukomuko	5	19.090,50	254,6
7	Lebong	-	-	90,8
8	Kepahiang	6	-	215,9
9	Bengkulu Tengah	3	1.149,40	113,6
10	Kota Bengkulu	1	29.502,40	239,2
	Total	25	62.290,50	1.769,40

Sumber: Laporan Statistik Perikanan Tangkap DKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Kegiatan penangkapan ini didukung oleh adanya prasarana dan sarana bidang penangkapan, antara lain: TPI/PPI, perahu/kapal 4.148 unit (3.388 unit jumlah kapal penangkapan di laut, dan 760 unit kapal di perairan umum) dengan alat tangkap antara lain: pukat kantong (*seine nets*), pukat cincin (*purse seine*), jaring insang (*gill nets*), jaring angkat (*lift nets*), pancing (*hook and line*), perangkap (*traps*), alat pengumpul kerang (*shellfish collection*), alat pengumpul rumput laut (*sea weed collection*) dan lainnya.

Tabel 7. Jumlah Armada Penangkapan Menurut Jenisnya di Propinsi Bengkulu Tahun 2015.

No	Kab/Kota	Jumlah	Jenis Perairan									
			Perairan Laut						Perairan Umum			
			Sub Jumlah	Perahu Tanpa Motor	Motor Tempel	Kapal Motor					Perahu Tanpa Motor	
			< 5 GT	5 - 10 GT	10 -20 GT	20 - 30 GT	30 - 50 GT	50 -100 GT				
1	Bengkulu Selatan	356	347	0	321	26	-	-	-	-	-	9
2	Rejang Lebong	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
3	Bengkulu Utara	647	459	232	225	2	-	-	-	-	-	188
4	Kaur	811	680	46	634	-	-	-	-	-	-	131
5	Seluma	383	360	217	143	-	-	-	-	-	-	23
6	Mukomuko	632	553	0	420	133	-	-	-	-	-	79
7	Lebong	42	0	0	0	-	-	-	-	-	-	42
8	Kepahiang	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	145
9	Bengkulu Tengah	371	312	23	220	69	-	-	-	-	-	59
10	Kota Bengkulu	761	677	55	100	350	100	35	25	12	-	84
	Jumlah	4.148	3.388	573	2.063	580	100	35	25	12	-	760

Sumber: Laporan Statistik Perikanan Tangkap DKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Perikanan Budidaya di Provinsi Bengkulu meliputi kegiatan perbenihan dan pembesaran. Produksi perbenihan tahun 2015 sebesar 433.809.650 ekor. Jumlah produksi perbenihan berdasarkan kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Produksi Benih Perikanan Budidaya Air Tawar Menurut Kab./Kota Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Tahun (Ekorx1000)
1	Bengkulu Selatan	62.376,000
2	Rejang Lebong	3.205,200
3	Bengkulu Utara	307.587,600
4	Kaur	384,300
5	Seluma	470,840
6	Muko-muko	135,000
7	Lebong	23.843,000
8	Kepahiang	2.159,000
9	Bengkulu Tengah	3.120,200
10	Kota Bengkulu	5.968,000
	Jumlah	409.249,140

Sumber: Laporan Statistik Perbenihan Perikanan Budidaya DKP Provinsi Bengkulu, 2015

Untuk mendukung ketersediaan benih ikan di Provinsi Bengkulu, hingga tahun 2015 beberapa Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) sudah memproduksi benih ikan untuk budidaya pembesaran. Jenis ikan yang diproduksi BBI didominasi ikan Nila dan ikan Mas, sedangkan jenis yang lain adalah lele, gurame, nilem, mujair, dan patin. Jumlah BBI, kondisi dan status kepemilikan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Jumlah BBI, Kondisi dan Status Kepemilikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/kota	Kondisi	Status Kepemilikan
1	Bengkulu Utara		
	a) BBI Arga Makmur	Aktif	DKP Provinsi
	b) BBI Kuro Tidur	Aktif	DKP Provinsi
	c) BBI BL 9	Aktif	DKP Provinsi
	d) BBI Margasakti	Aktif	DKP Provinsi
	e) BBI Kemumu	Aktif	DKP Provinsi
	f) BBI Pagar Mas	Aktif	DKP Kabupaten
	g) BBI Lubuk Durian	Aktif	DKP Kabupaten
2	Seluma		
	a) BBI Seluma	Aktif	DKP Kabupaten
3	Rejang Lebong		
	a) BBI Blumai	Aktif	DKP Kabupaten
	b) BBI Dusun Baru	Aktif	DKP Kabupaten
	c) BBI Rimbo Recap	Aktif	DKP Kabupaten
	d) BBI Babakan Baru	Aktif	DKP Kabupaten

4	Lebong		
	a) BBI Nangau Tayau	Aktif	DKP Kabupaten
5	Muko-muko		
	a) BBI Lubuk Pinang	Aktif	DKP Kabupaten
6	Kepahyang		
	a) BBI Klobak	Aktif	DKP Provinsi
	b) BBI Peraduan Binjai	Aktif	DKP Kabupaten
7	Kaur		
	a) BBI Bandu Agung	Aktif	DKP Kabupaten
	b) BBI Suku Tiga Nasal	Aktif	DKP Kabupaten
8	Bengkulu Tengah		
	a) BBI Karang Tinggi	Aktif	DKP Provinsi
	b) BBI Pagar Jati	Aktif	DKP Kabupaten
9	Kota		
	-		
10	Bengkulu Selatan		
	a) BBI Darat Sawah	Aktif	DKP Kabupaten
	b) BBI PeMuatang Gambir Air Nipis	Aktif	DKP Kabupaten
	c) BBI Rantau Sialang Kedurang	Aktif	DKP Kabupaten

Sumber: Laporan Statistik Perikanan Budidaya DKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Selain kegiatan perbenihan, Perikanan Budidaya juga beraktifitas dalam hal pembesaran ikan. Keadaan Luas Potensi, Luas Pemanfaatan lahan, dan Peluang Pengembangan menurut jenis kegiatan (tambak, kolam, sawah, karamba, dan jaring apung) di kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 secara rinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 10. Luas Potensi, Luas Pemanfaatan Lahan, dan Peluang Pengembangan Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2015.

No	Kabupaten / kota	Tambak			Kolam			Sawah			Karamba			Jaring Apung			Budidaya Laut		
		LP	LM	P	LP	LM	P	LP	LM	P	LP	LM	P	LP	LM	P	LP	LM	P
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1	Bengkulu Selatan	120	-	120	351	351,00	-	479	109,35	369,65	75	0,16	74,84	40	-	40	-	-	-
2	Bengkulu Utara	1.895,21	55	1.841	22.123,71	1.143,28	20.980,43	890,65	-	890,65	356	-	356	-	-	-	-	-	-
3	Seluma	1.222	1,03	1.221	275	275	-	256	-	256	75	-	75	25	-	25	-	-	-
4	Rejang Lebong	-	-	-	640,2	74,00	566,20	-	-	-	-	-	-	0,80	0,03	0,77	-	-	-
5	Lebong	-	-	-	267,4	191,00	76,40	-	-	-	-	-	-	0,042	0,03	0,012	-	-	-
6	Muko-Muko	500	2	498	2.185	220,00	1.965,00	5.988	10,10	5.977,90	5.000	100,30	4.899,70	2.000	170,00	1.830,00	100	0	100
7	Kepahyang	-	-	-	10.633,5	75,40	10.558,10	12.990,00	200,00	12.790,00	-	-	-	10	1,50	8,50	-	-	-
8	Kaur	700	53,20	647	1.228	1.228,00	-	2.560	-	2.560	190	-	190	70	0,043	69,96	700	0	700
9	Kota Bengkulu	274	123	151	315	315,00	-	234	-	234	150	0,43	149,57	40	4,08	35,92	-	-	-
10	Bengkulu Tengah	502	350	152	661	661,00	-	125	19,00	106	75	-	75	25	0,30	24,70	-	-	-
	Total	5.213	583,85	4.629	38.680	4.533,68	34.146,13	23.523	338,45	23.184	5.921	100,89	5.820	2.210,84	175,98	2.034,86	800	0	800

Sumber: Laporan Statistik Perikanan Budidaya DKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Ket LP :Luas Potensi LM:Luas Pemanfaatan P:Peluang

Produksi perikanan budidaya tahun 2015 mencapai 76.637,96ton. Produksi Perikanan Budidaya menurut Kabupaten/Kota tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)
1	Bengkulu Selatan	16.885,00
2	Rejang Lebong	3.220,50
3	Bengkulu Utara	18.887,22
4	Kaur	3.004,60
5	Seluma	3.034,76
6	Muko-muko	9.614,76
7	Lebong	5.037,00
8	Kepahiang	2.295,61
9	Bengkulu Tengah	6.749,00
10	Kota Bengkulu	6.129,40
	Jumlah	74.857,85

Sumber: Laporan Statistik Perikanan Budidaya DKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Jenis Ikan yang dominan dikembangkan oleh masyarakat, baik melalui usaha semi intensif maupun skala usaha intensif adalah jenis ikan Mas (*Cyprinus carpio sp.Lin*), Nila (*Tilapia Nilotica sp*) dan sebagian kecil adalah jenis Gurami (*Ospronemus gorammy*) dan Lele (*Clarias sp*).

Perlakuan terhadap hasil usaha perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Bengkulu antara lain: pemasaran dan pengolahan baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan. Pemasaran hasil perikanan dilakukan oleh pengumpul, pengecer dan pedagang besar/distributor. Lebih jelasnya, jumlah unit pengolahan dan jumlah unit pemasaran kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

No.	Kabupaten/Kota	Unit Pengolahan Hasil Perikanan	Unit Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah
1	Bengkulu Selatan	14	206	220
2	Rejang Lebong	7	393	400
3	Bengkulu Utara	95	47	142
4	Kaur	22	514	536
5	Seluma	33	389	422
6	Mukomuko	113	427	540
7	Lebong	14	161	175
8	Kepahiang	16	84	100
9	Bengkulu Tengah	38	129	167
10	Bengkulu	151	844	995
	Jumlah	503	3.194	3.697

Sumber: Laporan Statistik P2HP DKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Pengolahan hasil perikanan dilakukan dalam beberapa cara, antara lain: penggaraman, pengasapan dan pengolahan lainnya. Lebih jelasnya, jumlah unit pengolahan hasil perikanan berdasarkan jenis pengolahan di kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Jenis Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015

No	Kabupaten/kota	Jumlah UPI	Jenis Pengolahan (Unit)								
			Pembekuan	Penggaraman/Pengeringan	Pemindangan	Pengasapan/Pemanggangan	Fermentasi	Pereduksian/ Ekstraksi	Pelumuatan daging ikan	Penanganan Produk Segar	Lainnya
1	Bengkulu Selatan	14	0	3	0	2	0	-	2	0	7
2	Rejang Lebong	7	0	0	0	0	0	-	1	0	6
3	Bengkulu Utara	95	0	72	0	19	0	-	0	0	4
4	Kaur	22	0	9	0	1	0	-	3	6	3
5	Seluma	35	0	5	0	24	0	2	1	0	3
6	Mukomuko	113	0	84	0	29	0	-	0	0	0
7	Lebong	12	0	0	0	10	0		2	0	0
8	Kepahiang	16	0	0	0	2	0		3	0	11
9	Bengkulu Tengah	38	0	34	0	1	0	0	0	0	3
10	Kota Bengkulu	151	0	77	0	9	0	2	14	0	49
	Total	503	0	284	0	97	0	4	26	6	86

Ket: Lainnya: (abon, kerupuk, empek-empek)
Sumber: Laporan Statistik Perikanan P2HP DKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Potensi Wisata Bahari di Provinsi Bengkulu juga memiliki peluang untuk dikembangkan, hal ini ditopang oleh keragaman jenis lingkungan yang dimiliki. Kawasan terumbu karang terfokus di Pulau Enggano dan Kabupaten Kaur. Secara umum kekayaan lingkungan laut di Provinsi Bengkulu dapat dikembangkan dalam bentuk komoditi pariwisata, yaitu: Wisata Pantai (*Seaside Tourism*), Wisata Alam (*Eco Tourism*) dan Wisata Olahraga dan pancing (*Sport Tourism*).

Provinsi Bengkulu juga memiliki 10 pulau-pulau kecil; 9 (Sembilan) termasuk dalam kawasan Kabupaten Bengkulu Utara dan 1 (satu) terletak di Kota Bengkulu. Nama pulau-pulau tersebut adalah:

1. Kab. Bengkulu Utara: Bangkei (tidak berpenghuni), Dua Kecil (tidak berpenghuni), Dua (berpenghuni), Enggano (berpenghuni), Mega (tidak berpenghuni, bekas mercusuar), Merbau (tidak berpenghuni), Satu (tidak berpenghuni), Tapakarifin (tidak berpenghuni), Tapakbalai (tidak berpenghuni)
2. Kota Bengkulu: Tikus (berpenghuni, mercusuar)

Selain pulau-pulau kecil, di Bengkulu juga telah dikembangkan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), yaitu:

1. KKLD Pengelolaan Konservasi Penyu di Kab. Mukomuko, berdasarkan SK Bupati Mukomuko Perda No. 4 tahun 2010
2. Penunjukan Kawasan Linau, Merpas, Sekunyit sebagai KKLD Kab. Kaur, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Perda No. 180 tahun 2007
3. Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Enggano di Kecamatan Enggano, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tahun 2010.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kuantitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Kelautan dan Perikanan, beberapa capaian kinerja yang telah disepakati dalam Penetapan kinerja Tahun 2011-2015 yang diwujudkan melalui program kegiatan sepanjang tahun 2011-2015 dapat dilihat pada capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis OPD seperti yang tertera di bawah ini.

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat adanya pencapaian target pada Sasaran Strategis 1: “Efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan” dengan indikator Jumlah jenis ikan yang dikonversi secara berkelanjutan. Pencapaian target ini terjadi pada tahun 2013. Faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pelayanan ini antara lain: tidak adanya kegiatan konservasi ini baik sumber dana APBN maupun APBD.

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat adanya pencapaian target pada Sasaran Strategis 2: “Terwujudnya pengembangan teknologi eksploitasi dan pendayagunaan sumberdaya kelautan” dengan indikator Pendapatan Asli Daerah. Pencapaian target ini terjadi pada sepanjang tahun RPJMD. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini antara lain: berfungsinya sarana dan prasarana yang tercatat sebagai asset Pemda Provinsi Bengkulu yang mendatangkan PAD baik sewa bangunan, perizinan maupun jasa lainnya.

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat adanya pencapaian target pada Sasaran Strategis 3: “Peningkatan produksi dan kualitas produk yang berdaya saing tinggi” dengan indikator kinerja sebagai berikut: Jumlah produksi perikanan tangkap, Jumlah Produksi Perikanan budidaya, Jumlah produk olahan hasil perikanan. Nilai produksi ketiga indikator ini meningkat. Hal ini didukung oleh adanya kegiatan yang berkaitan dengan adanya bantuan alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan, bantuan induk unggul, benih unggul, dan pakan ikan untuk pembudidaya ikan, program kegiatan sarana dan prasarana penangkapan, budidaya dan pengolahan perikanan, serta pelatihan terhadap pelaku utama perikanan. Program kegiatan budidaya ini juga didukung oleh:

- Masyarakat sudah memulai memanfaatkan pakan mandiri yang menggunakan bahan baku pakan yang berasal dari lingkungan sekitar tempat Budidaya.
- Harga ikan yang sudah stabil ditingkat pelaku utama perikanan
- Meningkatnya jumlah pembudidaya
- Banyak pelaku usaha yang bergerak dibidang pengolahan hasil perikanan.

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat adanya pencapaian target pada Sasaran Strategis 4: “Pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir melalui penerapan teknologi tepat guna dan pendekatan pembangunan berbasis kerakyatan” dengan indikator kinerja sebagai berikut: Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikasi yang memenuhi standar, Jumlah perbenihan yang bersertifikat, Rasio kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan, serta Rasio pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional.

Berdasarkan capaian kinerja indikator 1 dan 2 melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: adanya program kegiatan yang mendukung kegiatan pembudidayaan dan perbenihan baik APBN (antara lain kegiatan Pengembangan Sistem Produksi

Pembudidayaan Ikan dan kegiatan Sistem Perbenihan Ikan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Satker 04 tahun 2014 dan 2015), maupun APBD melalui kegiatan Rehab Balai Benih Ikan tahun 2015).

- Indikator jumlah perbenihan yang bersertifikat ini ditujukan untuk Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) di Balai Benih Ikan Sentral Marga Sakti dan instalasi. Saat ini perbenihan yang sudah memenuhi standar Cara Budidaya Ikan yang Baik adalah Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) dan Balai Benih Ikan Klobak.
- Indikator jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikasi yang memenuhi standar, dari target 45 unit tercapai 145 unit karena terkait pengetahuan dan keterampilan SDM pembudidaya yang sudah cukup baik, adanya sarana dan prasarana budidaya yang sudah memadai, pelaksanaan pelatihan peningkatan SDM perikanan serta sudah bertambahnya auditor CBIB tingkat Provinsi.

Capaian indikator 3 dan 4 (Rasio kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan, serta Rasio pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional) tidak mencapai 100 %. Beberapa hal yang mendukung capaian kinerja adalah: adanya program kegiatan yang mendukung perikanan tangkap urusan pelabuhan dan armada penangkapan ikan baik APBN (Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap/Satker 03, antara lain kegiatan Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, rehab gudang ikan dan rehab pelelangan ikan, peningkatan jalan lingkungan Balai Pelabuhan Perikanan Pulau Baai tahun 2014 kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan), maupun APBD (antara lain kegiatan bantuan peralatan penangkapan ikan, bantuan sarana pengawasan, bantuan timbangan dan fish container).

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat adanya pencapaian target pada Sasaran Strategis 5:“ Pemberdayaan angkatan kerja melalui peningkatan sumberdaya manusia dan diversifikasi produk perikanan” dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Konsumsi ikan per kapita,
2. Nilai Tukar Nelayan (NTN),
3. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI),
4. Jumlah pendapatan nelayan,
5. Jumlah pendapatan pembudidaya ikan,
6. Rata-rata pendapatan pengolah dan pemasar,
7. Jumlah nelayan perikanan tangkap,
8. Jumlah pembudidaya,
9. Jumlah pengolah dan Pemasar

Berdasarkan capaian kinerja indikator tersebut di atas, nilai capaian meningkat. Beberapa hal yang mendukung capaian kinerja adalah:

- Meningkatnya nilai konsumsi ikan/kapita/tahun dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan semakin meningkat didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mensosialisasikan gemar makan ikan melalui kegiatan safari gemar ikan dan lomba masak serba ikan tingkat Provinsi maupun tingkat nasional yang dilaksanakan pada kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan/Satker 06.
- Adanya kegiatan pengkayaan stok sumberdaya ikan di perairan (*restocking*) yang menambah ketersediaan ikan untuk dikonsumsi (APBD tahun 2015).
- Bertambahnya pendapatan pembudidaya ikan menunjukkan adanya produksi yang dapat dijual dengan harga yang menguntungkan pelaku utama, dan akan mempengaruhi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI).
- NTP/NTPI > 100 berarti nelayan/pembudidaya ikan mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga kebutuhannya. Pendapatan naik lebih besar dari pengeluarannya. Tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya meningkat.
- Bertambahnya jumlah tenaga kerja di sektor perikanan menunjukkan bahwa menjadi pelaku utama perikanan bukan hanya sekedar sampingan. Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama yang didukung oleh program kegiatan sumber dana APBN/APBD pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh: 1) kegiatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien Tertib Berkelanjutan, kegiatan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap/Satker 03 (untuk penambahan jumlah nelayan), 2) kegiatan Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan, kegiatan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Satker 04 (untuk penambahan jumlah pembudidaya), dan 3) kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi, kegiatan Fasilitasi pengembangan Industri Pengolahan hasil Perikanan Program Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan/Satker 06 (untuk penambahan jumlah pengolah dan pemasar).
- Adanya program kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan teknis, pelatihan, dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan dan manajemen usaha pelaku utama perikanan yang disertai dengan monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan yang didukung oleh program APBN maupun APBD.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah:

- Cuaca ekstrim yang menyebabkan terhambatnya kegiatan penangkapan di laut yang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan.
- Tingginya terget kinerja NTN dan NTPI yang ditetapkan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat adanya pencapaian target pada Sasaran Strategis 6: "Terbentuknya suatu aparatur pengawas yang profesional dengan berbasis kinerja terpadu "dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase cakupan wilayah pengelolaan perikanan yang terawasi dari illegal fishing,
2. Persentase cakupan wilayah pengelolaan perikanan yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan,
3. Jumlah pulau-pulau termasuk pulau kecil terluar yang dikelola,
4. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan,
5. Persentase penyelesaian penyidik tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu.

Berdasarkan capaian kinerja indikator tersebut di atas, nilai capaian meningkat. Beberapa hal yang mendukung capaian kinerja adalah: untuk Sasaran Strategis 6 dengan beberapa indikator kinerja seperti tersebut diatas, capaian indikator 1, 3, dan 4 dan 5 mencapai target yang ditetapkan karena adanya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil, pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk kawasan Provinsi Bengkulu yang memiliki 7 Kabupaten/Kota wilayah pesisir dan memiliki 10 pulau-pulau kecil dan hingga saat ini ada beberapa kasus tindak pidana perikanan yang masih tahap proses penyidikan.

Pada tahun 2014 baru 11 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif melaksanakan kegiatan pengawasan SDKP sedangkan pada tahun 2015 capaian indikator POKMASWAS yang aktif melaksanakan kegiatan pengawasan SDKP meningkat menjadi 15 POKMASWAS. Hal ini didukung oleh Program Pengembangan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Satker 05 (APBN) yang terdiri dari kegiatan Penyelesaian Tindak Pidana kelautan dan Perikanan, kegiatan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan, serta kegiatan Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur.

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat adanya pencapaian target pada Sasaran Strategis 7: "Pengendalian kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dengan pengembangan konsep

kewilayahan/regional” dengan indikator kinerja sebagai berikut: Jumlah lokasi yang mempunyai dokumen rencana pengelolaan termasuk pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil yang terintegrasi dan terkendali pemanfaatannya.

Berdasarkan capaian kinerja indikator tersebut di atas, nilai capaian meningkat. Beberapa hal yang mendukung capaian kinerja adalah: adanya Program Pengembangan dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil. Jumlah lokasi yang mempunyai dokumen rencana pengelolaan termasuk pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil yang terintegrasi dan terkendali pemanfaatannya, capaian kinerja mencapai target dikarenakan ketiga lokasi yang memiliki kawasan konservasi mendukung kegiatan yang ada di kawasan konservasi tersebut.

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat adanya pencapaian target pada Sasaran Strategis 8: Tertatanya suatu mekanisme kinerja pendistribusian aplikasi teknologi dan informasi data potensi dan pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis pada pengembangan informasi teknologi” dengan indikator kinerja sebagai berikut: Peningkatan jumlah masyarakat yang sadar mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Berdasarkan capaian kinerja indikator tersebut di atas, nilai capaian meningkat. Beberapa hal yang mendukung capaian kinerja adalah: ada tidanya anggaran Sosialisasi Mitigasi Bencana. kegiatan Penyadaran Masyarakat Dalam Upaya Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim. Output dari Kegiatan ini adalah terbentuknya masyarakat pesisir yang tanggap bencana alam.

Kegiatan ini penting dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu karena kegiatan ini bertujuan:

- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat pesisir tentang bencana alam.
- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha mencegah terjadinya bencana melalui program pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang bertanggung jawab.
- Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengembangkan upaya mitigasi bencana.

Sasaran dari kegiatan ini :

- Terbentuknya kesadaran masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir secara bertanggung jawab dalam rangka mencegah terjadinya bencana alam.
- Terwujudnya peran serta Pemda dan masyarakat pesisir dalam mengembangkan pola mitigasi bencana.

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat adanya pencapaian target pada Sasaran Strategis 9: ”Peningkatan terhadap pelayanan publik melalui pemberdayaan kelembagaan sektor kelautan dan

perikanan yang mengacu pada kinerja profesionalisme” dengan indikator kinerja: Jumlah dokumen Perizinan yang diterbitkan.

Berdasarkan capaian kinerja indikator tersebut di atas, nilai capaian meningkat. Beberapa hal yang mendukung capaian kinerja adalah:

- APBN (terdiri dari Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap / Satker 03 (DK/TP) berkaitan dengan Surat Izin Usaha Perikanan tangkap (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- APBD yang meliputi; Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan kinerja secara umum adalah:

- Sosialisasi teknis perikanan dan pembinaan terhadap pelaku utama perikanan secara kontinyu.
- Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penangkapan, pembudidayaan, dan pengolahan hasil perikanan yang sesuai aturan.
- Tersedianya anggaran yang cukup.

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, rasio antara realisasi anggaran dari anggaran pada Tahun 2011 program secara umum baik karena dari 8 (delapan) program yang ada, realisasi anggaran 6 program diatas 80 %. Program yang realisasi anggarannya 0 % adalah:

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung yang dihasilkan pada tahun 2011. Namun tidak dilakukan pencairan keuangannya karena keterlambatan pengajuan Surat Perintah Membayar ke Biro Keuangan Setda Provinsi Bengkulu.
- Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. Hal yang menjadi penghambat tidak dilaksanakannya kegiatan ini adalah keterbatasan waktu dan kurangnya SDM yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan penyerapan anggaran secara umum adalah:

- Tersedianya fasilitas yang memadai
- Komitmen untuk melayani stakeholder dengan baik
- Tersedianya fasilitas yang memadai guna mendukung terlaksananya program kegiatan
- Semangat kerja dan tanggung jawab penyelesaian tugas yang baik dari tim pelaksana
- Tersedianya juklak, juknis dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang jelas

Berdasarkan tabel di atas, rasio antara realisasi anggaran dari anggaran pada Tahun 2012 program secara umum baik karena dari 8 (delapan) program yang ada, realisasi anggaran 5 program diatas 60 %. Program yang realisasi anggarannya kurang dari 60 % adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Pengembangan Perikanan Tangkap (termasuk DAK) dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Hasil Perikanan.

Beberapa hal yang menjadi penghambat antara lain:

- Pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, kegiatan sumberdana DAK (Pengadaan Kapal >30 GT) tidak bisa dilaksanakan karena tender kapal di ULP gagal terhitung tanggal 18 September 2012.
- Pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Hasil Perikanan, kegiatan FS dan DED Pembangunan Rumah Packaging tidak bisa dilaksanakan karena pelaksanaan tender paket jasa konsultan tidak cukup waktu lagi sesuai dengan aturan.
- Kurang jelasnya petunjuk penggunaan anggaran pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan tabel di atas, rasio antara realisasi anggaran dari anggaran pada Tahun 2013 program secara umum baik karena dari 8 (delapan) program yang ada, realisasi anggaran 5 program diatas 60 %. Program yang realisasi anggarannya kurang dari 60 % adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program peningkatan SDM Perikanan, termasuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap (termasuk DAK) yang rendah dalam serapan anggarannya. Beberapa hal yang menjadi penghambat antara lain:

- Adanya pergantian KPA serta perubahan SK kegiatan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu
- Pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, kegiatan sumberdana DAK (Pengadaan Kapal >30 GT) terjadi putus kontrak.
- Kurang jelasnya petunjuk penggunaan anggaran pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan tabel di atas, rasio antara realisasi anggaran dari anggaran pada Tahun 2014 program secara umum baik karena dari 8 (delapan) program yang ada, realisasi anggaran 7 program diatas 60 %. Program yang realisasi anggarannya kurang dari 60 % adalah Program peningkatan SDM Perikanan. Beberapa hal yang menjadi penghambat adalah kurang jelasnya petunjuk penggunaan anggaran pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Berdasarkan tabel di atas, rasio antara realisasi anggaran dari anggaran pada Tahun 2015 program secara umum baik karena dari 8 (delapan) program yang ada, realisasi anggaran 8 program diatas 60 %.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan penyerapan anggaran secara umum adalah:

- Tersedianya fasilitas yang memadai
- Komitmen untuk melayani stakeholder dengan baik
- Tersedianya fasilitas yang memadai guna mendukung terlaksananya program kegiatan
- Semangat kerja dan tanggung jawab penyelesaian tugas yang baik dari tim pelaksana
- Tersedianya juklak, juknis dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang jelas

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD perlu selalu mengikuti pemenuhan kebutuhan. Untuk saat ini dan ke depan perlu adanya anggaran yang cukup:

- untuk sarana dan prasarana bidang informasi dan teknologi guna terlaksananya kerja yang baik dan kondusif.
- Untuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup dinas dan UPTD.

- Perlu adanya penambahan CPNS/PNS Pengawas Perikanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu:

A. Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga teknis bidang kelautan dan perikanan menjadi penyebab belum optimalnya pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Bengkulu. Kondisi ini dapat diatasi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

2. Koordinasi

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan diperlukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Pemda Provinsi Bengkulu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, serta instansi terkait lainnya.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana masih kurang sehingga kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan belum optimal.

4. Teknologi

Teknologi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu cukup memadai dengan tersedianya internet tetapi perlu peningkatan penggunaan teknologi baik di kantor maupun di lapangan.

B. Eksternal

1. Tingginya biaya produksi

Untuk perikanan budidaya, tingginya biaya produksi meliputi harga pakan, sedangkan perikanan tangkap tingginya biaya produksi meliputi harga alat tangkap, armada, dan biaya operasional untuk melaut menjadi faktor yang menghambat

2. Rendahnya konsumsi makan ikan perkapita masyarakat

Konsumsi makan ikan perkapita Provinsi Bengkulu sebesar 32,18 kg/kapita/tahun (Data Susenas BPS Tahun 2014) masih rendah dibandingkan Konsumsi makan ikan perkapita Nasional sebesar 38 kg/kapita/tahun.

3. Pengawasan penangkapan dan kegiatan lain yang mengancam sumberdaya laut.

Peluang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu:

1. Kebijakan pemerintah

Regulasi sektor kelautan dan perikanan yang belum tertata dengan baik harus dibenahi sesegera mungkin sehingga semua program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlaksana. Dengan adanya Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu merupakan dasar acuan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Bengkulu.

2. Terbukanya Pasar (domestik dan internasional)

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan permintaan pasar akan ikan menjadi lebih tinggi. Hal ini menjadi peluang bagi produsen dan pelaku usaha perikanan lainnya untuk meningkatkan produksi dan pendistribusian hasil perikanan.

3. Meningkatnya nilai jual dan daya beli masyarakat

Produk perikanan merupakan produk yang cepat menurun tingkat kesegarannya (*perishable food*). Dengan penanganan pasca panen yang baik akan menjamin tingginya nilai jual produk. Faktor meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan masyarakat akan ikan.

4. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk

Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani diharapkan akan meningkatkan tingkat konsumsi ikan perkapita penduduk.

5. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menyebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan protein hewani dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat perikanan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan yang menjadi tantangan untuk dipecahkan di masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

- Terbatasnya sumberdaya manusia yang ada.
- Rendahnya disiplin pegawai dalam mendukung *good governance*.
- Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung optimalisasi tugas pokok dan fungsi.

b. Bidang Perikanan Tangkap

- Terbatasnya akses permodalan.
- Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia petugas, nelayan dan pelaku usaha bidang penangkapan.
- Terbatasnya anggaran untuk bantuan kapal nelayan.
- Masih ada penggunaan alat tangkap Trawl.
- Armada penangkapan yang digunakan pada umumnya < 5 GT.
- Penangkapan beroperasi pada jalur penangkapan I (0 - 4 mil).
- Proses alih teknologi belum optimal, baik teknologi produksi maupun pasca panen.
- Domisili nelayan masih tersebar di sepanjang pantai, konsentrasi produksi dan bongkar muat tidak terkonsentrasi, sehingga PPI/TPI tidak optimal.
- Belum adanya pelabuhan perikanan untuk kapal ukuran lebih dari 20 GT, baik Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN / Tipe B) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP / Tipe C) di kabupaten pesisir Provinsi Bengkulu.
- Tidak berjalannya pelelangan ikan.

c. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Masih banyak Unit Perbenihan Rakyat (UPR) belum menggunakan induk unggul bersertifikat.
- Jumlah dan kualitas induk unggul masih terbatas baik milik DKP maupun milik UPR.
- Sebagian besar bibit ikan masih didatangkan dari luar daerah.
- Tingkat pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan masih rendah.
- Permodalan pembudidaya ikan masih rendah.

- Tingginya biaya produksi (pakan).
- Belum adanya saluran irigasi khusus untuk BBIS.
- Belum optimalnya konektivitas informasi pasar.
- Usaha pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan belum optimal.
- Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dan perbenihan ikan kurang memadai.
- Belum terbukanya akses pasar hasil perikanan.
- Terbatasnya permodalan untuk usaha pengolahan.
- Kurangnya teknologi pengolahan.
- Pengolahan masih berskala rumah tangga.

d. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Kurangnya penganggaran untuk kegiatan konservasi oleh DKP di kabupaten/kota melalui APBD dan DAK.
- Kurangnya pemahaman legislatif dalam pengertian kegiatan pesisir sehingga penganggaran untuk kegiatan tersebut terbatas.
- Terjadinya kerusakan terumbu karang, abrasi pantai dll.
- Terbatasnya anggaran sosialisasi mitigasi bencana di kab/kota wilayah pesisir.
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan wisata bahari di kabupaten/kota pesisir Provinsi Bengkulu.
- Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sesuai peruntukan.

e. Program Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- Masih kurangnya SDM di bidang pengawasan, terutama PPNS dan Pengawas Perikanan
- Belum adanya dana dukungan tentang penyidikan tindak pidana perikanan.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan bidang perikanan.
- Rendahnya biaya operasional pengawasan SDKP.
- Kurangnya pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
- Tidak adanya kapal pengawas ukuran panjang 18 m.

UPT Dinas Kelautan dan Perikanan

f. Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT)

- Terbatasnya SDM yang ada.

- Sering terjadi pengeringan atau rehab irigasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- Belum adanya irigasi khusus untuk BBIS.
- Belum adanya kearifan local yang diunggulkan.
- Masih banyak kolam yang bocor sehingga perlu pemeliharaan.
- Sarana dan prasarana di hatchery masih kurang memadai

g. Balai Pelabuhan Perikanan (BPP) Provinsi Bengkulu

- Kualitas SDM PPNS dan Pengawas Perikanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kurangnya kesadaran pemilik kapal untuk melakukan bongkar muat di PPI Pulau Baai.
- Pendangkalan di kolam pelabuhan.

h. Balai Budidaya Ikan Laut / Pantai (BBILP)

- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (belum adanya saluran pemasukan air, pintu air, bak tandon, dan pagar keliling).
- Belum adanya akurasi data tambak.
- Terbatasnya SDM yang ada.
- Perlu adanya kerjasama dengan Balai Besar Budidaya Air Laut KKP.

i. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL)

- Masih kurangnya pemahaman tupoksi BPSPL oleh TAPD.
- Tingginya kerusakan daerah pesisir.
- Kurangnya pemahaman masyarakat pesisir tentang jenis ikan yang dilindungi.
- Terbatasnya anggaran yang ada
- Terbatasnya SDM yang ada.

j. LPPMHP

- Kewenangan pengendalian dan pengujian mutu di LPPMHP kembali ke pusat (BKIPM) sesuai UU 23 Tahun 2014.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang mendukung OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 16. Kepala Daerah terpilih mempunyai beberapa program untuk mewujudkan Visi dan Misinya melalui 5 (Lima) Program Prioritas Pembangunan Daerah. Lima Program Prioritas tersebut adalah:

1. Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan
2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim dan Hilirisasi
3. Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi

4. Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
5. Visit 2020 Wonderful Bengkulu.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu secara fokus ikut memaksimalkan kinerja untuk mendukung pencapaian program prioritas ke 1, 2 dan 5.

Tabel 16. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Terwujudkan Bengkulu yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing Tinggi			
Misi :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan 2. Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif 			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam peningkatan pendapatan daerah	1. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan.	1. Operasional pemanfaatan dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan	1. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengolahan dan pengawasan potensi sumberdaya kelautan
	2. Meningkatnya pembangunan industri maritim dan transportasi laut yang integratif dan berdaya saing	2. Optimalisasi pendayagunaan dan pengendalian sumberdaya kemaritiman	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, pemasaran hasil pertanian/perkebunan/peternakan dan perikanan 3. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan potensi sumberdaya kemaritiman

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Dalam rangka mencapai **visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI: "Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional"** dan mewujudkan 3 pilar yang menjadi misi KKP-RI; 1. Kedaulatan (*Sovereignty*), 2. Keberlanjutan (*Sustainability*), 3. Kesejahteraan (*Prosperity*), maka dengan beberapa *Grand Strategy* akan mempermudah pencapaian tujuan dengan melakukan strategi pembangunan nasional yang terkait dengan 4 agenda/Nawa Cita sesuai dengan tugas KKP:

1. Agenda/ Nawa Cita ke-1:
Sub Agenda: Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim
2. Agenda/ Nawa Cita ke-4:
Sub Agenda: Pemberantasan Perikanan *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) Fishing
3. Agenda/ Nawa Cita ke 6:
Sub Agenda: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

4. Agenda/ Nawa Cita ke 6:

Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan Melalui Peningkatan Produksi Perikanan

Sub Agenda: Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dituangkan dalam *Quick Wins* dan program lanjutan lainnya. *Quick Wins* merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Quick Wins yang akan dilakukan antara lain:

- a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat
- b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan
- c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa
- d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut
- e. Pembangunan Techno Park Berbasis Perikanan Rakyat
- f. Mendukung Operasil Keamanan Laut di Perairan Perbatasan
- g. Realokasi Subsidi Menjadi LPG ke Nelayan, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM

Disamping *Quick Wins*, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara lain:

- a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton pada tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan *Best Aquaculture Practices*.
- b. Pemberantasan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing*.
- c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Sinergitas Program Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Provinsi Bengkulu serta 10 Kabupaten/Kota melalui sinkronisasi program dan kegiatan pada Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pada Provinsi Bengkulu dan 10 kabupaten/kota. Anggaran yang ada ditujukan untuk mengimplementasikan program/kegiatan yang mendukung prioritas nasional 2015-2019 melalui Rencana Kerja KKP-RI yang tersebut pada *Quick Wins* dan Program Lanjutan di atas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan mengacu kepada UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014

Tentang Perubahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan memperhatikan kelestarian mangrove, terumbu karang, Sumber Daya Ikan, mitigasi bencana, konservasi wilayah laut (pemanfaatan kelautan dan perikanan secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil), pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung prioritas nasional 2015-2019 melalui Rencana Kerja KKP-RI yang tersebut pada *Quick Wins* dan Program Lanjutan di atas.

Keunikan wilayah pesisir, yang merupakan daerah interaksi dan laut dengan beragam sumber daya yang ada, mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut secara terpadu bukan secara sektoral, dengan beberapa alasan sebagai berikut (Bengen, 2004):

- a. Secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas.
- b. dalam kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan.
- c. Dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda.
- d. Baik secara ekologis maupun ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur (*single use*) adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha.
- e. Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumber daya milik bersama (*common property resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*). Pemanfaatan yang bijak dari semua pengguna sumber daya diharapkan dapat mencegah terjadinya pencemaran, over-eksploitasi sumber daya alam dan konflik pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Perubahan iklim global

Perubahan iklim global ikut mempengaruhi hasil tangkapan ikan para nelayan karena perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan jadwal kegiatan operasional penangkapan ikan menjadi tidak teratur.

2. Bencana alam dan tsunami

Pembangunan wilayah pesisir yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem pesisir dan laut. Hal ini menjadi penyebab utama terjadinya bencana alam di wilayah ini. Tsunami merupakan gelombang besar yang ditimbulkan oleh tenaga yang tiba-tiba dilepaskan oleh gempa bumi atau letusan gunung bawah laut dan kadang-kadang menyebabkan kerusakan dan bencana yang merugikan.

3. Ketahanan pangan dan energi, serta konsumsi ikan

Peningkatan produksi ikan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta adanya diversifikasi pengolahan hasil perikanan dapat menjamin ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan jenis hewani dimasa yang akan datang serta meningkatnya tingkat konsumsi ikan/kapita/tahun masyarakat.

4. *Over fishing* dan *Illegal Fishing*

Over fishing merupakan istilah kegiatan penangkapan ikan yang melebihi kapasitas stok (cadangan) perikanan setempat. Hal ini antara lain dapat disebabkan karena tingginya tingkat penangkapan di wilayah pesisir dan penggunaan alat tangkap trawl yang mengabaikan keberlanjutan sumberdaya ikan.

Kegiatan penangkapan di Provinsi Bengkulu masih banyak dilakukan oleh pelaku perikanan yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang maupun beroperasi di kawasan yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Wilayah laut Provinsi yang luas dan masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan juga menyebabkan terjadinya *illegal fishing*.

5. Kerusakan Lingkungan Hidup

Pembangunan wilayah daratan dan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan menyebabkan rusaknya ekosistem daratan dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada wilayah pesisir.

6. Kemiskinan nelayan

Kemiskinan nelayan disebabkan oleh kondisi alam, rendahnya tingkat pendidikan, pola hidup nelayan, pemasaran hasil tangkap dan akses permodalan.

7. Penciptaan lapangan kerja

Pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Bengkulu diharapkan menciptakan lapangan kerja baru seperti pembukaan lahan untuk kolam budidaya ikan, dan diversifikasi usaha perikanan.

8. Pertumbuhan ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya pembangunan kelautan dan perikanan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan serta akan meningkatkan pula pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir.
9. Meningkatnya wisata bahari dan kuliner
Seiring dengan peningkatan pembangunan dan penataan kawasan pantai sehingga timbul alternatif tempat wisata seperti wisata bahari dan kuliner yang mengolah hasil laut.
10. Sarana dan Prasarana
Sarana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu masih kurang dan diantaranya dalam kondisi tidak layak pakai. Selain itu, sarana prasarana di pelabuhan perikanan sangat perlu ditingkatkan dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai / Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPP/PPN) guna mendukung perkembangan perikanan tangkap.
11. Kapasitas SDM kelautan dan perikanan masih rendah
Pengetahuan dan keterampilan SDM perikanan masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas.
12. Kesehatan ikan dan lingkungan
Adanya virus yang menyerang ikan yang dibudidayakan para pembudidaya menyebabkan kesehatan ikan dan lingkungan terganggu yang akan menyebabkan produktivitas pembudidaya ikan tidak maksimal.
13. Rendahnya produktifitas nelayan dan pembudidaya ikan
Rendahnya produktifitas nelayan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung sehingga banyak nelayan yang tidak melaut dan juga sarana dan prasarana yang digunakan seperti ukuran armada penangkapan yang digunakan oleh nelayan < 5 GT serta alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan masih bersifat tradisional.
Sedangkan rendahnya produktifitas pembudidaya ikan dikarenakan masih kurangnya induk unggul, terbatasnya ketersediaan bibit berkualitas, mahalnya pakan ikan, serta masih rendahnya penguasaan teknologi perbenihan.

Untuk menentukan strategi arah pembangunan kelautan dan perikanan dianalisis melalui SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat*) yaitu untuk mengetahui *Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan tantangan dan peluang serta dipadukan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada, maka dapat dibuat beberapa strategi dalam pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Bengkulu. Strategi-strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Analisis SWOT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Faktor	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
<p>Internal</p> <p>Eksternal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan yang mendukung - Tersedianya regulasi dibidang KP - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai - Tingginya nilai ekonomi produk KP 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas - Belum optimalnya fungsi kelembagaan - Tingginya biaya operasional produksi - Tingkat konsumsi ikan belum mencapai target nasional - Belum optimalnya nilai ekonomi sektor KP
Opportunity (Peluang)	Strategi S - O	Strategi W - O
<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan dan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai Provinsi Maritim - Peluang pasar ikan cenderung meningkat - Peningkatan konsumsi ikan - Produk KP sebagai unggulan - Potensi kawasan dan SDA KP 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergi kebijakan pemerintah pusat, Provinsi dan kab/kota melalui sinkronisasi program dan kegiatan - Sosialisasi GEMARIKAN - Mengembangkan kawasan untuk peningkatan produksi KP - Memanfaatkan nilai ekonomi produk KP untuk pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pelatihan dan pendidikan SDM - Mengurangi, menekan biaya produksi, dan memperluas pasar domestik maupun internasional - Pemanfaatan sumberdaya KP untuk meningkatkan konsumsi makan ikan masyarakat - Meningkatkan nilai ekonomi sektor KP sebagai komoditas unggulan Provinsi Bengkulu
Threat (Ancaman)	Strategi S - T	Strategi W - T
<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan iklim, cuaca, dan bencana alam - Penyakit ikan - <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUfishing)</i> - Kerusakan mangrove, terumbu karang, dan ekosistem biota laut 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan, pemanfaatan, dan mitigasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan - Pengendalian lingkungan, obat-obatan, dan hama penyakit ikan - Penegakan hukum, peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan - Konservasi sumberdaya kelautan, perikanan, dan pulau-pulau kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mengantisipasi perubahan iklim, cuaca dan bencana alam - Manajemen kesehatan ikan untuk mengurangi biaya operasional produksi - Sosialisasi GEMARIKAN dan pengendalian wilayah <i>fishing ground</i> serta melindungi ekosistem SDKP dan penegakan hukum - Memacu peningkatan produksi perikanan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup (mangrove, terumbu karang dan ekosistem biota laut).

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki;

VISI :

“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN, MAJU DAN BERDAYA SAING UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

MISI:

1. Meningkatkan produk hasil kelautan dan perikanan yang aman, bernilai tambah dan berdaya saing.
2. Mengoptimalkan pengelolaan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.
4. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan pengelolaan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan daya saing serta sistem logistik ikan menuju keamanan pangan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut.
- 4) Meningkatkan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang taat aturan.

Sasaran

Sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut adalah :

- 1) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap.
- 2) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap.
- 3) Meningkatnya produksi perikanan budidaya.

- 4) Meningkatnya daya saing produk saing produk kelautan dan perikanan .
- 5) Meningkatnya pengelolaan ruang laut.
- 6) Meningkatnya pemanfaatan ruang laut.
- 7) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pesisir.
- 8) Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang taat aturan.

4.2 Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi Pembangunan OPD

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh adalah:

- 1) Operasional pemanfaatan, potensi dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kemaritiman.

Kebijakan umum OPD

Dalam mencapai kegiatan pembangunan yang sesuai dengan *visi* dan *misi* pembangunan tersebut, maka kebijakan umum pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Bengkulu adalah: **“Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap yang berkelanjutan serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dan perikanan”**.

Tabel 4.1 (18) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR 2021	
				2015	2016	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatkan pengelolaan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	64,059.90	64,110.00	64.110-66.033	66.033-68.344	68.344-70.804	70.804-73.494	73.494-75.618	73.494-75.618	
			Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105	105	103	105	107	109	110	110	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya perikanan tangkap	Rasio Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan	0	1 : 5	3 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	5
			Rasio industri galangan kapal/perahu yang dibangun	0	0	0	0	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	3
			Rasio pengembangan kawasan kemaritiman	0	0	7 : 7	7 : 7	7 : 7	7 : 7	7 : 7	7 : 7	7
2	Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan daya saing serta sistem logistik ikan menuju keamanan pangan.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	74,857.85	90,530.26	87.939-97.101	97.101-106.957	106.95-19.580	119.580-127.580	127.580-131.538	127.580-131.538	
			Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	103.00	103.00	92,56	102,56	112,56	122,56	132,56	0.00	
		Meningkatnya daya Saing produk kelautan dan perikanan	Rata-rata konsumsi ikan per kapita (kg/kapita/tahun)	37,11	37,29	40,25	42,27	44,39	46,61	48,94	48,94	
			Persentase peningkatan Unit Pengolahan Hasil Perikanan (unit)	45	47	50	50	50	50	50	297	
3	Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pesisir	Persentase Kawasan Wisata Bahari Berbasis Konservasi yang dikembangkan (%)	0	0	0	25	25	25	25	100	
			Persentase sumber daya manusia Masyarakat Pesisir yang terampil dalam pemanfaatan sumber daya pesisir (%)	50	50	70	75	75	75	75	75	
		Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Persentase pengelolaan ruang laut yang dikembangkan (%)	15	17	20	23	25	27	30	30	

		Meningkatnya pemanfaatan ruang laut	Persentase pemanfaatan ruang laut yang dikembangkan (%)	15	15	20	21	23	25	25	25
4	Meningkatkan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang taat aturan	Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang taat aturan	Persentase penyelesaian perkara/kasus pelanggaran kelautan dan perikanan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
			Frekuensi pengawasan pelaku usaha kelautan perikanan (kali)	5	8	10	10	15	20	20	83

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam kerangka strategis nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Program harus dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dituangkan dalam *Quick Wins* dan program lanjutan lainnya. *Quick Wins* merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu akan direalisasikan melalui program/kegiatan/rencana kerja masing-masing bidang. Sebagai dasar pengusulan program/kegiatan tahun 2016-2021 digunakan program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 serta rencana pembangunan strategis lainnya.

5.1.1 Program APBN

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP (DK),
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (DK)
- 3) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (DK dan TP)
- 4) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DK)
- 5) Program Pengelolaan Ruang Laut (DK)
- 6) Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DK)

5.1.2 Program APBD

- i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- iii. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- iv. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- v. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- vi. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
- vii. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- viii. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- ix. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- x. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- xi. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Perikanan
- xii. Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya alam

5.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan pengerahan sumberdaya yang bertujuan untuk mencapai sasaran program yang diarahkan melalui rencana kerja masing-masing bidang. Pada tahun 2016 ini program-program dan kegiatan yang sudah direncanakan sudah mulai direalisasikan di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari: Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Seluma, Rejang Lebong, Lebong, Muko-Muko, Kepahiang, Kaur, Kota Bengkulu, dan Bengkulu Tengah.

Kegiatan APBN

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP (DK)
Pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KKP, meliputi kegiatan:
 - Pembinaan pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan keuangan KKP
 - Pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KKP
 - Pengembangan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (DK), meliputi kegiatan:
 - Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan sertifikasi awak kapal perikanan
 - Pengelolaan pelabuhan perikanan
 - Pengendalian penangkapan ikan
 - Pengelolaan kenelayanan
 - Pengelolaan sumberdaya ikan
 - Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (DK dan TP), meliputi kegiatan:
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
 - Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
 - Pengelolaan kawasan Perikanan Budidaya
 - Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Perikanan Budidaya
 - Pengelolaan Pakan Ikan
 - Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan (danaTP)
 - Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. Perikanan Budidaya (Dana TP)
- 4) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DK), meliputi kegiatan:
- Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
 - Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
 - Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan
 - Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan
 - Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan
- 5) Program Pengelolaan Ruang Laut (DK), meliputi kegiatan:
- Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
 - Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
 - Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
 - Perencanaan Ruang Laut
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ditjen Pengelolaan Ruang Laut
- 6) Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DK), meliputi kegiatan:
- Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
 - Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
 - Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan
 - Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2SDKP

Kegiatan APBD

- i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya:
 - Penyedia jasa surat menyurat.
 - Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan.

- Penyedia jasa kebersihan kantor.
 - Penyedia alat tulis kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
 - Penyedia jasa administrasi & teknis perkantoran.
 - Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang milik daerah.
- ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya:
- Pembangunan gedung kantor.
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - Pengadaan meubeler.
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional.
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 - Penyediaan media informasi.
 - Pengadaan sarana prasarana UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT).
 - Pengadaan sarana dan prasarana Tambak Percontohan.
 - Pengadaan sarana dan prasarana UPT Balai Benih Ikan Laut Payau (BBILP).
 - Pembangunan rumah kapal pengawas.
- iii. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- iv. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
 - Penyusunan rencana anggaran, kegiatan dan pelaporan.
- v. Peningkatan SDM Perikanan
- Koordinasi dan sinkronisasi program perencanaan bidang kelautan dan perikanan.
- vi. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Pengadaan kapal penangkapan ikan > 10 GT.
 - Pengadaan alat bantu penangkapan ikan (GPS, Fish Finder).
 - Sosialisasi bidang perikanan tangkap.

- Pengadaan mesin motor tempel (25 PK).
- Sewa Tanah PPI Pulau Baai (PPI).
- Pertemuan statistik perikanan tangkap.
- Pengadaan rumah ikan.
- Sinkronisasi SEHAT Nelayan dan Kartu Nelayan.
- Penilaian Adi Bakti Mina Bahari di Kabupaten/Kota.
- Penertiban kapal di Pelabuhan Perikanan Pulau Baai.
- Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) menjadi koperasi berbadan hukum.
- Operasi penertiban pedagang di Pelabuhan Pulau Baai.
- Sosialisasi penerimaan PAD di Pelabuhan Pulau Baai.
- Pengadaan peralatan penangkapan ikan.
- Pengadaan peralatan dan mesin kapal/perahu.
- Peningkatan SDM nelayan.
- Penerapan program logbook dan observer di atas kapal.
- Peningkatan pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (PPI Pulau Baai).
- Rapat koordinasi kepala PPI dan TPI Kabupaten/Kota.
- Fasilitasi akses permodalan pelaku usaha perikanan tangkap.
- Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Bengkulu (DAK).
- Pembuatan DED TPI Muara Bantal Di Kab Mukmuko.
- FS/ DED Pengembangan industri galangan kapal nelayan.
- Pengembangan galangan kapal perikanan.

Kegiatan-kegiatan perikanan tangkap ini mendukung indikator kinerja ini mendukung pencapaian indikator kinerja yang menjadi target kinerja sepanjang tahun 2016-2021 yang terdiri dari:

- a. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
- b. Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan (Lokasi)
- c. Jumlah industri galangan kapal/perahu yang dibangun (unit)

Selain kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat juga kegiatan lainnya yang mendukung 5 (lima) program prioritas pembangunan daerah yang dapat dilihat pada Tabel 19 (5.1).

- vii. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - Pengembangan desa nelayan mapan di kabupaten/kota pesisir.
 - Penguatan Kelembagaan Usaha Perikanan.
 - Monitoring dan evaluasi penerima PUMP.
 - Sinkronisasi SEHAT Nelayan dan Kartu Nelayan.

Kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini mendukung pencapaian indikator kinerja: “Jumlah kawasan kampung nelayan terpadu yang dikembangkan (Kawasan)” (Pilot Project Agro Maritim).

viii. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pengadaan/pencetakan induk ikan untuk BBI dan UPR.
- Pengembangan bibit ikan laut pantai.
- Pengadaan bibit ikan air tawar.
- Pengadaan pakan untuk masyarakat.
- Pengadaan pakan untuk BBIS dan Instalasi.
- Sosialisasi Juknis perizinan usaha perikanan budidaya.
- Pelatihan pembudidaya ikan (pakan mandiri, budidaya patin, budidaya udang, vaksinasi, Hama Penyakit Ikan, dll).
- Uji coba pemeliharaan udang Vanamei.
- Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya (sumber dana DAK).
- Penilaian Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB).
- Mengikuti Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA).
- Pengadaan ikan lele terpal.
- Pembinaan dan monev masyarakat tambak (BBILP).
- Pelatihan petugas perikanan budidaya (aplikasi sistem statistik dan validasi data statistik).
- Demplot tambak udang.
- Penilaian Apresiasi kelembagaan perikanan budidaya perikanan air tawar terbaik.
- Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam pembudidayaan ikan melalui magang ke luar daerah.

Kegiatan-kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan ini mendukung pencapaian indikator kinerja yang menjadi target kinerja sepanjang tahun 2016-2021 yang terdiri dari:

- a. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
- b. Jumlah Unit Budidaya tersertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) (Unit Budidaya)

Selain kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat juga kegiatan lainnya yang mendukung 5 (lima) program prioritas pembangunan daerah yang dapat dilihat pada Tabel 19 (5.1).

ix. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- Lomba masak serba ikan.
- Safari gemar makan ikan.
- Pengadaan peralatan pengolahan ikan.
- Peringatan Hari Ikan Nasional.
- Pembinaan ke Sentra SLIN.
- Penyusunan Buku Ragam Produk dan nilai tambah hasil perikanan.
- Pameran dan promosi peluang investasi produk olahan ikan.
- Sosialisasi dan monitoring Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP).
- Workshop Penghitungan Angka Konsumsi Ikan Kabupaten/Kota.
- Pengawasan keluar masuk ikan.
- Fasilitasi akses permodalan pelaku usaha pengolahan.
- Penguatan kelembagaan pelaku usaha pengolahan.
- Pembinaan poklamsar.

Kegiatan-kegiatan dari Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan ini mendukung pencapaian indikator kinerja “Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan (unit)” tahun 2016-2021. Selain kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat juga kegiatan lainnya yang mendukung 5 (lima) program prioritas pembangunan daerah yang dapat dilihat pada Tabel 19 (5.1).

x. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Program/kegiatan ini diadakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja “Jumlah Kawasan Wisata Bahari Berbasis Konservasi yang dikembangkan (Kawasan)”. Pada tahun 2015 dan 2016 kegiatan-kegiatan pada program ini masih terpisah di 3 (tiga) program pendukung, yaitu: a). Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, b). Program Perlindungan dan Konservasi SDA, dan c). Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan. Mulai tahun 2018, program/kegiatan ini dikelompokkan secara tersendiri untuk lebih lokusnya penganggaran kegiatan dalam rangka menyukseskan Program Prioritas *Visit 2020 Wonderful Bengkulu*. Kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel 19 (5.1).

xi. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

- Sosialisasi Konservasi terumbu karang
- Upaya pelestarian penyu bertelur
- Pembinaan lokasi penyu bertelur

- xii. Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Penyusunan RZWP3K.
 - Sosialisasi jenis ikan yang dilindungi.
 - Penanaman vegetasi di wilayah pesisir.
 - Rehabilitasi vegetasi di Pulau Tikus Kota Bengkulu.
 - Identifikasi pemulihan terumbu karang di Provinsi Bengkulu.
 - Promosi pariwisata bahari.
 - Pelatihan selam dan operasional alat selam kelautan perikanan.
 - Peringatan Hari Nusantara.
 - Pembentukan dan pembinaan kelembagaan wisata bahari di kabupaten/kota.
 - Transplantasi terumbu karang di Provinsi Bengkulu.
 - Pengembangan mitra bahari Provinsi Bengkulu.

Kegiatan-kegiatan dari Program Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini mendukung pencapaian indikator kinerja “Jumlah dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tersedia” tahun 2016-2021. Selain kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat juga kegiatan lainnya yang mendukung 5 (lima) program prioritas pembangunan daerah yang dapat dilihat pada Tabel 19 (5.1).

- xiii. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
- Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten/Kota.
 - Temu koordinasi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
 - Rapat forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan.

Kegiatan-kegiatan dari program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan ini mendukung pencapaian indikator kinerja: “Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang taat aturan (%)”. Selain kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat juga kegiatan lainnya yang mendukung 5 (lima) program prioritas pembangunan daerah yang dapat dilihat pada Tabel 19 (5.1).

Adapun rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif DKP Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1 (20)

Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	64059.9	64110	64.110-66.033	66.033-68.344	68.344-70.804	70.804-73.494	73.494-75.618	73.494-75.618
2	Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN)	105	105	103	105	107	109	110	110
3	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	74,858	90,530	87.939-97.101	97.101-106.957	106.957-119.580	119.58-127.580	127.58-131.538	127.580-131.538
4	Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	103	103	92,56	102,56	112,56	122,56	132,56	0
5	Persentase Kawasan Wisata Bahari Berbasis Konservasi yang dikembangkan (%)	0	0	0	25	25	25	25	100
6	Persentase sumber daya manusia Masyarakat Pesisir yang terampil dalam pemanfaatan sumber daya pesisir (%)	50	50	70	75	75	75	75	75
7	Persentase pengelolaan ruang laut yang dikembangkan (%)	15	17	20	23	25	27	30	30
8	Persentase pemanfaatan ruang laut yang dikembangkan (%)	15	15	20	21	23	25	25	25

9	Persentase penyelesaian perkara/kasus pelanggaran kelautan dan perikanan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Frekuensi pengawasan pelaku usaha kelautan perikanan (kali)	5	8	10	10	15	20	20	83
11	Rasio Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan	0	1 : 5	3 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	5
12	Rasio industri galangan kapal/perahu yang dibangun	0	0	0	0	1 : 3	1 : 3	1 : 3	3
13	Rasio pengembangan kawasan kemaritiman	0	0	7 : 7	7 : 7	7 : 7	7 : 7	7 : 7	7
14	Rata-rata konsumsi ikan per kapita (kg/kapita/tahun)	37,11	37,29	40,25	42,27	44,39	46,61	48,94	48,94
15	Persentase peningkatan Unit Pengolahan Hasil Perikanan (unit)	45	47	50	50	50	50	50	297

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu 2016 - 2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu dan berpedoman pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi panduan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk jangka 5 tahun (2016 - 2021) yang mampu memberikan arahan strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi dan kondisi. Demikian, untuk 5 (lima) tahun ke depan perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu telah terarah dan terfokus sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Naskah Renstra OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 -2021 ini selanjutnya disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

Tabel 5.1 (19). Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu

Kode	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN								TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI (SUMBER DANA)	KETERANGAN
				TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD				
				CAPAIAN	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		12.753.166.400	18.963.218.600	19.760.285.000	19.775.782.472	29.214.800.000	40.000.000.000	50.000.000.000	177.714.086.072											
	Jumlah jenis pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi yang dilaksanakan	11	11	1.837.559.300	11	1.650.154.000	13	2.356.982.472	13	2.346.900.000	13	2.407.200.000	13	2.360.200.000	13	12.958.995.772	SEKRETARIAT	APBD		
	1	Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disampaikan dalam setahun	5057 lembar	5150	20.680.000	5250	23.540.000	5300	25.000.000	5350	26.500.000	5400	28.000.000	5450	30.000.000	31900	153.720.000	SEKRETARIAT	APBD		
	2	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekuensi pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun	12 bulan	12	376.000.000	12	354.500.000	12	360.582.472	12	428.000.000	12	428.000.000	12	428.000.000	12	2.375.082.472	SEKRETARIAT	APBD		
	3	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah aparatur pengadministrasian keuangan	21 orang	21	183.000.000	22	195.810.000	22	196.000.000	22	197.000.000	22	198.000.000	22	199.000.000	131	1.168.810.000	SEKRETARIAT	APBD		
	4	Penyedia jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	orang	12	87.200.000	6	93.304.000	6	142.400.000	6	142.400.000	6	142.400.000	6	142.400.000	42	750.104.000	SEKRETARIAT	APBD		
	5	Penyedia alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	30 jenis	30	69.132.300	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	180	569.132.300	SEKRETARIAT	APBD		
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	80000 lembar	80000	75.200.000	400.000	100.000.000	400.000	100.000.000	400.000	100.000.000	400.000	100.000.000	333.333	100.000.000	2013333,3	575.200.000	SEKRETARIAT	APBD		
	7	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Frekuensi pemeliharaan instalasi listrik dan penerangan gedung kantor dalam 1 tahun	12 bulan	12	79.057.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	454.057.000	SEKRETARIAT	APBD	Transposasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
	8	Penyediaan bahan bacaan dan perundangan-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang tersedia	5 majalah	5	58.270.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	5	77.800.000	30	406.070.000	SEKRETARIAT	APBD		
	9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12	282.000.000	12	250.000.000	12	325.000.000	12	330.000.000	12	330.000.000	12	325.000.000	12	1.842.000.000	SEKRETARIAT	APBD		
	10	Pertemuan dalam rangka peringatan hari besar keagamaan dan hari nasional	Jumlah hari besar keagamaan dan hari nasional yang diperingati	0 kali	0	0	0	0	7	100.000.000	7	100.000.000	7	152.800.000	7	100.000.000	28	452.800.000	SEKRETARIAT	APBD		
	11	Penyedia jasa administrasi & teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorar sumberdana APBD	38 orang	40	576.000.000	29	348.000.000	29	591.600.000	29	591.600.000	29	591.600.000	29	591.600.000	185	3.290.400.000	SEKRETARIAT	APBD		
	12	Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah aparatur pendataan aset barang milik	6 orang	7	31.020.000	7	50.000.000	4	96.400.000	4	26.400.000	4	26.400.000	4	26.400.000	30	256.620.000	SEKRETARIAT	APBD		
	13	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah kabupaten/kota tujuan sinkronisasi Program Perencanaan Bidang KP	10 kab/kota	0	0	0	0	10	75.000.000	10	75.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	40	310.000.000	SEKRETARIAT	APBD		
	14	Ekspose ke luar daerah dalam mendukung Monev terpadu KKP	Jumlah expose di KKP	0 kali	0	0	0	0	1	100.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	4	355.000.000	SEKRETARIAT	APBD		
	Jumlah sarpras aparatur yang dibangun/direhab/dipelihara (Unit)	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarpras aparatur yang dibangun/direhab/dipelihara (Unit)	29	1.665.593.000	3.829.264.000	2.932.000.000	835.000.000	3.226.800.000	1.965.000.000	14.453.657.000											
	1	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	3 unit	0	0	3, rehab aula	545.000.000	8	1.000.000.000	-	0	-	0	-	0	10	1.545.000.000	SEKRETARIAT	APBD	Transposasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Percontohan	Jumlah sarpras Tambak Percontohan yang diadakan dan dipelihara	0 unit	0	0	1	750.000.000	2	800.000.000	1	150.000.000	6	800.000.000	0	800.000.000	10	3.300.000.000	BBILP	APBD		
	3	Pengadaan sarpras BBILP	Jumlah sarpras BBILP yang dikembangkan	0 unit	0	0	2, haltheary dan tandor	700.000.000	-	0	-	0	Pagar RI 1	1.466.800.000	-	0	3	2.166.800.000	BBILP	APBD		
	4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	jenis	10	384.460.000	5	150.000.000	2	92.000.000	2	35.000.000	2	70.000.000	5	70.000.000	26	801.460.000	SEKRETARIAT	APBD		
	5	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang tersedia	3 jenis	0	0	3	150.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	15	950.000.000	SEKRETARIAT	APBD		
	6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi	22 unit	22	235.000.000	25	350.000.000	25	220.000.000	25	230.000.000	25	240.000.000	25	250.000.000	147	1.525.000.000	SEKRETARIAT	APBD		
	7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	4 unit	6	51.700.000	6	55.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	65.000.000	6	75.000.000	36	366.700.000	SEKRETARIAT	APBD	Transposasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
	8	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang difasilitasi	4 jenis	4	51.700.000	4	55.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	70.000.000	24	356.700.000	SEKRETARIAT	APBD		
	9	Pembuatan Papan Larangan konservasi	Jumlah Lokasi Konservasi	kab/kota	0	0	0	0	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000	BPSPL	APBD		
	10	Pengadaan Perlengkapan Petugas lapangan Pada Kawasan Konservasi	Jumlah jenis perlengkapan petugas lapangan	0 jenis	0	0	0	0	0	0	4	50.000.000	4	60.000.000	5	60.000.000	13	170.000.000	BPSPL	APBD		
	11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan roda 4 yang tersedia	unit	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	SEKRETARIAT	APBD	
	12	Pengadaan Peralatan Selam	Jumlah alat Selam	ster	0	0	0	0	0	0	0	0	10	215.000.000	20	300.000.000	30	515.000.000	BPSPL	APBD		
	13	Pengadaan alat Komunikasi	Jumlah jenis alat Komunikasi	0 jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	3	90.000.000	3	90.000.000	BPSPL	APBD		
	14	Pembuatan pagar dan rehab UPTD	Jumlah Lokasi pembangunan	lokasi	0	0	2, LPPMHP	559.264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	559.264.000	LPPMHP	APBD		
	15	Pengadaan sparepart excavator	Jumlah sparepart excavator yang tersedia	0 unit	0	0	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200.000.000	BUDDAYA	APBD		
	16	Pengadaan peralatan selam	jumlah alat selam, kompressor, dan perahu	jenis	0	0	3	315.000.000														
	17	Penyediaan Media Informasi	Jenis media yang tersedia di dinas	0 jenis	2	235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	235.000.000	SEKRETARIAT	APBD		
	18	Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	0 unit	11	379.673.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	379.673.000	SEKRETARIAT	APBD		
	19	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	2 jenis	4	103.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	103.400.000	SEKRETARIAT	APBD		
	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman	Jumlah Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman yang direhab	5 bangunan	4	224.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	224.660.000	SEKRETARIAT	APBD		
	Jumlah jenis peningkatan kapasitas SD Aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah jenis peningkatan kapasitas SD Aparatur	0 diklat	28.200.000	300.000.000	435.000.000	435.000.000	440.000.000	440.000.000	2.078.200.000											
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jenis diklat yang diikuti (pimpinan, fungsional, teknis)	0 diklat	1	28.200.000	1	155.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	14	1.183.200.000	SEKRETARIAT	APBD	Transposasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
	2	Rapat koordinasi penyuluh perikanan se Provinsi Bengkulu	Jumlah pertemuan dalam 1 tahun	0 pertemuan	0	0	0	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	735.000.000	SEKRETARIAT	APBD		
	3	Bimbingan teknis penyusunan program/kegiatan dan anggaran	Jumlah pegawai yang dilatih	0 Orang	0	0	0	0	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	200	160.000.000	SEKRETARIAT	APBD		

5	Pengadaan kapal penangkap ikan > 10 GT	Jumlah kapal penangkapan >10 GT yang diadakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.650.000.000	3	5.100.000.000	10	17.000.000.000	14	23.750.000.000	P. TANGKAP	APBD	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keterlambatan	
	6	Peringatan hari nelayan	Jumlah peringatan hari nelayan	0 kali	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	P. TANGKAP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu
	7	Operasional cek fisik kapal perikanan tangkap izin pusat dan daerah di provinsi	Jumlah Operasi cek fisik kapal perikanan tangkap izin pusat dan daerah di provinsi	0 kali	0	0	30	30.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	150	430.000.000	P. TANGKAP	APBD	Transparansi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
	8	Pengembangan pelayanan Balai Pelabuhan Perikanan Provinsi Bengkulu (PPI Pulau Baa)																						
	-	Operasi Penerbitan Pedagang di Pelabuhan Pulau Baa	Jumlah Operasi Penerbitan Pedagang di Pelabuhan Pulau Baa	0 kali	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	150.000.000	PPI	APBD	Pengembangan Infrastruktur	
	-	Rapat Koordinasi Kepala PPI dan TPI Kab/Kota	Jumlah rapat Kepala PPI dan TPI Kab/Kota	0 kali	1	32.900.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	6	232.900.000	PPI	APBD	Pengembangan Strategi dan Industrialisasi & Transparansi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
	-	Peningkatan Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan (PPI)	Jenis Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan	0 jenis	0	0	5	40.000.000	5	40.000.000	5	44.000.000	5	46.000.000	5	48.000.000	5	48.000.000	25	218.000.000	PPI	APBD		
	-	Sewa Tanah PPI Pulau Baa (PPI)	Frekuensi pembayaran Sewa Tanah PPI Pulau Baa (PPI) dalam 1 tahun	1 kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P. TANGKAP	APBD	
	-	Penerapan program logbook dan observer di atas kapal	Jumlah peserta sosialisasi penerapan program logbook dan observer di atas kapal	0 orang	0	0	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	200	150.000.000	PPI	APBD		
	-	Sosialisasi Penerimaan PAD di Pelabuhan Pulau Baa	Jumlah Sosialisasi PAD di Pelabuhan Pulau Baa	0 kali	0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	200.000.000	PPI	APBD		
	9	Pengadaan rumah ikan	Jumlah rumah ikan fish apartement (pula enggano, pulau tikus)	1 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	320.000.000	2	660.000.000	2	670.000.000	5	1.650.000.000	P. TANGKAP	APBD	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keterlambatan	
	-	Penerbitan kapal di pelabuhan perikanan pulau baa	Jumlah Penerbitan kapal di pelabuhan perikanan pulau baa	0 kali	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40.000.000	PSDKP	APBD	Penguatan Komoditi Unggulan Agromaritim dan Hilirisasi	
	-	Sinkronisasi SEHAT Nelayan dan Kartu Nelayan	Jumlah pertemuan	1 kali	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	P. TANGKAP	APBN	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keterlambatan
	-	Pembinaan PPI se prov. Bengkulu	Jumlah lokasi yang dibina	kab/kota pesisir	7	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	47.000.000				
	-	Pengadaan Perahu Mesin Penangkap ikan di Kab. Bengkulu Selatan	Jumlah perahu mesin untuk nelayan di Kab. BS	0 unit	5	188.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	188.000.000	P. TANGKAP	APBD		
	-	Pengadaan pancing penangkap ikan Kota Bengkulu	Jumlah lokasi	lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P. TANGKAP	APBD	
	-	Pengadaan Peralatan Penangkapan ikan	Jumlah alat tangkap yang tersedia	600 piece	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P. TANGKAP	APBD	
	-	Pertemuan Statistik Perikanan Tangkap	Jumlah peserta pertemuan	30 orang	30	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	47.000.000	P. TANGKAP	APBD		
		Rasio Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan	Rasio Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan	0	1:5	5.451.286.000	3:5	5.446.661.000	1:5	1.750.000.000	1:5	3.200.000.000	1:5	5.000.000.000	1:5	0	5	20.847.947.000						
	1	Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Bengkulu (DAK)	Jumlah dokumen FS dan DED yang tersedia	1 lokasi	1	4.511.286.000	3	5.096.661.000	0	0	0	0	0	0	0	5	9.607.947.000	P. TANGKAP	DAK					
	2	Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Bengkulu	Jumlah dokumen FS dan DED Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Bengkulu yang tersedia	0 dokumen	0	0	0	0	1	750.000.000	0	0	0	0	0	0	1	750.000.000	P. TANGKAP	APBD				
	3	Studi kelayakan pengembangan pelabuhan perikanan pantai Pulau Baa	Jumlah pelabuhan perikanan yang dikembangkan/dibangun	1 lokasi	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1	3.200.000.000	1	5.000.000.000	0	0	3	9.200.000.000	P. TANGKAP	APBD			Pengembangan Infrastruktur Strategi & Industrialisasi	
	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Nusantera	Jumlah dokumen yang tersedia	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P. TANGKAP	APBD		
	5	Pembuatan DED TPI Muara Bantal di Kab. Mukomuko	Jumlah dokumen yang dihasilkan	0 dokumen	1	940.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	940.000.000	P. TANGKAP	APBD				
	6	Study lokasi pembangunan pelabuhan perikanan di Provinsi Bengkulu	Jumlah dokumen yang dihasilkan	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P. TANGKAP	APBN		
	7	Pembuatan Masterplan dan DED Pelabuhan Perikanan Nusantera di P. Enggano																						
	Rasio industri galangan kapal/perahu yang dibangun	Rasio industri galangan kapal/perahu yang dibangun	0	0	0	0	0	0	150.000.000	1:3	1.150.000.000	1:3	1.150.000.000	1:3	1.000.000.000	3	3.450.000.000							
	1	Pengembangan galangan kapal perikanan	Jumlah dokumen FS dan DED Pengembangan galangan kapal perikanan yang dihasilkan	0 dokumen	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	0	0	3	450.000.000	P. TANGKAP	APBD			Pengembangan Infrastruktur Strategi & Industrialisasi	
			Jumlah industri galangan kapal yang dibangun	0 industri	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	1. Kota Ps Bengkulu	1. P. Baa	1.000.000.000	Bantal	1.000.000.000	3	3.000.000.000	P. TANGKAP	APBD				
	Rasio pengembangan kawasan kemaritiman	Rasio pengembangan kawasan kemaritiman	0	0	141.000.000	7:7	1.030.000.000	7:7	600.000.000	7:7	600.000.000	7:7	2.000.000.000	7:7	3.000.000.000	7	7.371.000.000						Prioritas 1 & 2	
	1	Pengembangan desa nelayan mapan di 7 kab/kota	Jenis peralatan yang diadakan	0 kab/kota pesisir	0	0	7	1.030.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P. TANGKAP	APBD	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keterlambatan	
			Jumlah lokasi pengembangan sanitasi lingkungan TPI di kawasan KKNS	0 lokasi	0	0	0	0	1	600.000.000	1	600.000.000	2	2.000.000.000	3	3.000.000.000	7	6.200.000.000	P. TANGKAP	APBD				
	2	Penguatan Kelembagaan Usaha Perikanan	Jumlah KUB yang dikuatkan	0 KUB	30	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	94.000.000	P. TANGKAP	APBN				
	3	Monitoring dan Evaluasi Penerima PUMP 2011-2015	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring	0 kab/kota	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P. TANGKAP	APBN		
	4	Sinkronisasi SEHAT Nelayan dan Kartu Nelayan	Jumlah nelayan peserta sinkronisasi	0 orang	30	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	47.000.000	P. TANGKAP	APBN				

Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	74.857,85	90.530,26	7.974.338.300	87.939-97.101	1.630.000.000	97.101-106.957	2.340.000.000	106.957-119.580	2.225.000.000	119.580-127.580	3.415.000.000	127.580-131.538	3.437.500.000	127.580-131.538	21.021.838.300	BUDDAYA			Prioritas 1 & 2
Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)			103,00	103,00		92,56		102,56		112,56		122,56		132,56		132,56					
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1 Pembentukan dan pengembangan Brood Stock Center	Jumlah lokasi pembentukan BSC	lokasi	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	2	100.000.000	PB & P2HP	APBD	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keterlaksanaan	
	- Pembentukan Brood Stock Centre	Jumlah lokasi pembentukan BSC	lokasi	0	0	0	0	1	100.000.000	1	200.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	1.300.000.000	PB & P2HP	APBD		
	- Pengembangan Brood Stock Centre	Jumlah pengadon calon induk ikan untuk BBIS dan Instalasi Mendukung BSC	0 jenis	0	0	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10	1.250.000.000	PB & P2HP	APBD		
	- Pengadaan pakan untuk BBIS dan Instalasi mendukung BSC	Jumlah pakan yang tersedia Untuk BBIS dan Instalasi Mendukung BSC	kg	0	0	16.178	400.000.000	28.500	400.000.000	28.500	400.000.000	28.500	400.000.000	16.175	275.000.000	117.850	1.875.000.000	PB & P2HP	APBD		
	2 Pembentukan dan penguatan Badan hukum Kelompok perikanan budidaya	Jumlah kelompok yang berbadan hukum	kelompok berbadan hukum	0	0	0	0	30	120.000.000	30	125.000.000	40	160.000.000	40	160.000.000	140	565.000.000	PB & P2HP	APBD	Penguatan Komoditi Unggulan Agro-Martim & Hilirisasi	
	- Pembentukan dan penguatan Badan hukum Kelompok perikanan budidaya	Jumlah pertemuan pelaku usaha perikanan budidaya dalam fasilitasi oleh KKMB	0 pertemuan	0	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	400.000.000	PB & P2HP	APBD		
	- Fasilitasi Konsultasi Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk pendampingan ke kelompok pelaku usaha perikanan budidaya	Jumlah peserta sosialisasi JUKNIS perizinan usaha perikanan budidaya	mbudidaya/pembenh ikan	0	0	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	150	200.000.000	PB & P2HP	APBD		
	- Fasilitasi Akses Permodalan	Jumlah peserta Fasilitasi Akses Permodalan	mbudidaya/pembenh ikan	0	0	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	150	200.000.000	PB & P2HP	APBD		
	- Identifikasi calon penerima bantuan hibah kepada masyarakat tahun 2018	Jumlah lokasi identifikasi	lokasi	0	0	1	100.000.000										100.000.000				
	- Penilaian CPIB dan CBIB	Jumlah lokasi penilaian CPIB dan CBIB	kab/kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PB & P2HP	APBD	
	3 Bantuan sarana perikanan budidaya	Jumlah pakan untuk masyarakat	kg	0	0	-	-	10.000	170.000.000	10.000	170.000.000	14.000	235.000.000	21.000	352.500.000	55.000	927.500.000	PB & P2HP	APBD		
	- Pengadaan Pakan Untuk Masyarakat	Jumlah bibit untuk masyarakat	ekor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PB & P2HP	APBD	
	- Pengadaan Bibit Ikan Untuk Masyarakat	Jumlah lokasi pendistribusian	0 kab/kota	0	0	0	0	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	280.000.000				
	- Pendistribusian bibit ikan untuk masyarakat	Jumlah mesin pencetak pakan untuk masyarakat	unit	0	0	0	0	3	100.000.000	3	100.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	18	600.000.000	PB & P2HP	APBD		
	- Pengadaan Mesin Pencetak Pakan ikan	Jumlah bibit ikan yang tersedia	ekor	0	0	140.056	50.000.000										50.000.000				
	- Penyediaan bibit ikan	Jumlah percontohan	lokasi	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	1.400.000.000	BBILP	APBD		
	4 Percontohan dan Pendampingan Budidaya Udang di Kota Bengkulu																0				
	5 Pengembangan dan pembinaan UPT BBILP	Jumlah uji coba dalam setahun	1 kali	-	0	1	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	240.000.000	BBILP	APBD		
	- Uji Coba Pemeliharaan udang Vanamei dan Kerapu Macan	Jumlah petambak yang dilatih	0 petambak udang	0	0	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	210	320.000.000	BBILP	APBD		
	- Pelatihan Pembudidaya Udang	Jumlah bibit calon induk ikan laut pantai	0 paket	0	0	2	40.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	6	1.340.000.000	BBILP	APBD	Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keterlaksanaan	
	- Pengembangan bibit calon induk ikan laut pantai	Jumlah studi banding yang dilaksanakan	0 SB	1	28.200.000	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	2	68.200.000	BBILP	APBD		
	- Study banding Teknologi laut ke Jepara / Situbondo	Jumlah lokasi monev	7 kab/kota	7	37.600.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	7	40.000.000	42	237.600.000	BBILP	APBD		
	- Pembinaan dan monev Masyarakat Tambak (BBILP)																0				
	6 Pelatihan bidang perikanan budidaya	Jumlah pembudidaya yang dilatih membuat pakan ikan	0 pembudidaya ikan	0	0	30	40.000.000	90	120.000.000	30	40.000.000	90	120.000.000	90	120.000.000	330	440.000.000	PB & P2HP	APBD		
	- Pelatihan Pakan Mandiri	Jumlah pembudidaya yang mengikuti pelatihan budidaya ikan						60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	240	320.000.000				
- Pelatihan Budidaya Ikan	Jumlah pembudidaya yang mengikuti pelatihan budidaya ikan nalin	0 pembudidaya ikan	0	0	90	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90	120.000.000	PB & P2HP	APBD			
- Pelatihan Hama Penyakit Ikan	Jumlah peserta sosialisasi hama penyakit ikan	mbudidaya/pembenh ikan	0	0	30	40.000.000	30	80.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	90	120.000.000	210	320.000.000	PB & P2HP	APBD			
- Pertemuan Dalam Rangka Perencanaan Tahunan Pemetaan Obat Ikan Kimia Biologi Tk. Daerah (PETAPOIKDA)	Jumlah petugas PETAPOIKDA	orang petugas	0	0	30	40.000.000	30	100.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	30	40.000.000	150	260.000.000	PB & P2HP	APBD			
7 Penas KTNA	Jumlah pameran yang diikuti	pameran	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	2	200.000.000	PB & P2HP	APBD	Visit 2020 Wonderful Bengkulu		
- Demplot Tambak udang	Jumlah demplot tambak udang	0 kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BBILP	APBD		
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)	Sapras BBIS yang dikembangkan	1 Lokasi	1	6.600.763.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.600.763.300	PB & P2HP	APBD			
- Pembinaan ke UPR	Lokasi UPR yang dibina	0 kab/kota	10	67.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	67.210.000	PB & P2HP	APBD			
- Pengadaan Bibit Ikan air tawar	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	4 jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PB & P2HP	APBD		
- Pengadaan pakan	Jumlah pakan yang tersedia	0 ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PB & P2HP	APBD		
- Pengadaan pakan untuk BBIS dan Instalasi	Jumlah pakan yang tersedia	1 ton	3	286.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	286.465.000	PB & P2HP	APBD			
- Operasional Alat Berat	Jumlah alat berat yang dioperasikan	2 unit	2	235.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	235.000.000	PB & P2HP	APBD			
- Pengadaan Induk Ikan	Jumlah jenis induk ikan yang tersedia	2 jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PB & P2HP	APBD		
- Pengadaan sarana dan prasarana tambak percontohan	Jumlah sapras tambak percontohan yang tersedia	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PB & P2HP	APBD		
- Pengadaan sarana dan prasarana BBIS	Jumlah sapras BBIS yang tersedia	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	PB & P2HP	APBD		
- Peningkatan SDM UPR	Jumlah lokasi sosialisasi	kab/kota	10	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	94.000.000	PB & P2HP	APBD			
- Pertemuan pembudidaya seprovinsi	Jumlah pertemuan pembudidaya	pertemuan	2	188.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	188.000.000	PB & P2HP	APBD				
- Pelatihan pembudidaya ikan (pakan mandiri, budidaya patin, vaksinasi, HPI, dll)	Jenis pelatihan yang dilaksanakan	1 jenis	4	437.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	437.100.000	PB & P2HP	APBD				
Rata-rata konsumsi ikan per kapita (kg/kapita/tahun)	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rata-rata konsumsi ikan per kapita (kg/kapita/tahun)	37,11	37,29	605.642.000	40,25	623.000.000	42,27	1.220.000.000	44,39	1.180.000.000	46,61	1.515.000.000	48,94	1.605.000.000	48,94	6.748.642.000				Prioritas 1 & 2
Rata-rata konsumsi ikan per kapita (kg/kapita/tahun)		Persentase peningkatan Unit Pengolahan Hasil Perikanan (unit)	45	47		50		50		50		50		50		297					

	1	Safari gemar Makan Ikan	Jumlah sekolah lokasi gemarikan	3 lokasi	3	159.800.000	1	50.000.000	10	100.000.000	1	75.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	19	684.800.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu	
Persentase peningkatan Unit Pengolahan Hasil Perikanan (unit)	2	Pembentukan dan penguatan Badan hukum Kelompok pengolahan dan pemasar hasil perikanan																				
		Pembentukan Badan hukum Kelompk P2HP	Jumlah kelompok yang berbadan hukum	kelompk	0	0	0	0	20	40.000.000	20	45.000.000	30	125.000.000	30	125.000.000	100	335.000.000	PB & P2HP	APBD	Pengentas Kemiskinan & Peretasan Keterlaksanaan	
		Fasilitasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk pendampingan ke kelompok pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	Jumlah sosialisasi dan pertemuan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dalam fasilitasi oleh KKMB	0 sosialisasi/pertemuan	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	4	250.000.000	PB & P2HP	APBD	Pengentas Kemiskinan & Peretasan Keterlaksanaan	
		Palatihan produk olahan ikan	Jumlah pelatihan yang diadakan	0 pelatihan	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	PB & P2HP	APBD	Pengentas Kemiskinan & Peretasan Keterlaksanaan	
		Workshop pengembangan produk olahan ikan	Jumlah workshop yang diadakan	0 kali	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	PB & P2HP	APBD	Pengentas Kemiskinan & Peretasan Keterlaksanaan	
		Bimbingan poklahaer	Jumlah pengolahan/UPI yang ditingkatkan kelembagaannya	0 Kab/Kota	0	0	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	40	200.000.000	PB & P2HP	APBD	Transparansi Brokrasi & Tata Kelola Pemerintahan	
		Pengadaan peralatan Pengolahan Ikan	Jumlah Peralatan pengolahan ikan	0 jenis	0	0	1	50.000.000	1	100.000.000	1	70.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	9	620.000.000	PB & P2HP	APBD	Transparansi Brokrasi & Tata Kelola Pemerintahan	
		Peningkatan Pelayanan UPTD LPPMHP																				
		Bimbingan ke Sentra SLIN	Jumlah kab/kota sentra SLIN	0 kabupaten	0	0	3	40.000.000	3	45.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.000.000	15	250.000.000	LPPMHP	APBD	Transparansi Brokrasi & Tata Kelola Pemerintahan	
		Bimbingan Penerapan Mutu dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan pada UPI Kab/Kota se-Provinsi Bengkulu	Jumlah kabupaten yang dibina	Kab/kota	0	0	10	73.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	85.000.000	10	100.000.000	50	418.000.000	LPPMHP	APBD	Transparansi Brokrasi & Tata Kelola Pemerintahan	
		Sosialisasi dan Monitoring Sertifikasi kelayakan Pengolahan (SKP)	Lokasi monitoring Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)	10 kab/kota	0	0	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	200.000.000	LPPMHP	APBD	Pengentas Kemiskinan & Peretasan Keterlaksanaan	
		5 Promosi produk olahan hasil perikanan																				
	Lomba Masak serba ikan tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah lomba Tk. Nasional yang diikuti	lomba	0	0	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	950.000.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	Pameran dan Promosi Peluang investasi produk Olahan Ikan	Jumlah Pameran dan Promosi Peluang investasi produk Olahan Ikan yang diikuti	1 pameran	0	0	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	450.000.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	Peringatan Hari Ikan Nasional	Jumlah peringatan Hari Ikan Nasional yang diadakan	0 kali	0	0	1	80.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	5	415.000.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	Festival Tabot Bengkulu Expo	Jumlah Festival Tabot yang diikuti	pameran	0	0	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	480.000.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	Pengadaan alat penggiling ikan di Kota Bengkulu	Jumlah pameran Bengkulu Expo yang diikuti	pameran	0	0	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	450.000.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	Praktek pengolahan di rumah packaging	Jumlah lokasi	lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu	
	Workshop Penghitungan Angka Konsumsi Ikan Kab/Kota	Frekuensi praktek pengolahan yang dilakukan	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu	
	Lomba Masak Serba Ikan tingkat nasional	Jumlah rapat dalam satu tahun	30 orang	30	46.342.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	46.342.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu	
	Lomba masak serba ikan tingkat provinsi	Jumlah tingkat nasional yang diikuti	1 kali	1	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	47.000.000	PB & P2HP	APBD/ APBN	Visi 2020 Wonderful Bengkulu	
	Pameran produk olahan ikan tingkat nasional	Jumlah lomba masak yang dilaksanakan	kali	1	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	47.000.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu	
	Kegiatan dan identifikasi movev kegiatan P2HP	Jumlah pameran produk olahan ikan tingkat nasional	kali	1	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	47.000.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu
	Bimbingan UPI dalam rangka produksi hasil perikanan	Jumlah lokasi movev	kab/kota	10	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	47.000.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu	
	Pertemuan statistik P2HP	Jumlah kabupaten yang dibina	Kab/kota	10	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	94.000.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu	
	Pengawasan Keluar Masuk ikan	Jumlah peserta kegiatan yang dilakukan	0 orang	1	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	47.000.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu	
		Jumlah pengawasan yang dilakukan	0 orang	3	70.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	70.500.000	PB & P2HP	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu	
Persentase Kawasan Wisata Bahari Berbasis Konservasi	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Kawasan Wisata Bahari Berbasis Konservasi yang dikembangkan (%)		0	0	170.500.000	0	-	25	1.195.000.000	25	3.712.000.000	25	3.095.000.000	25	4.575.000.000	100	12.747.500.000			Renstra	
Persentase sumber daya manusia Masyarakat Pesisir yang terampil dalam pemanfaatan sumber daya pesisir (%)	1 Pembangunan dan pengembangan pariwisata bahari	Persentase sumber daya manusia Masyarakat Pesisir yang terampil dalam pemanfaatan sumber daya pesisir (%)		50	50	70		75		75		75		75		75						
	- Workshop pembangunan pariwisata bahari	Jumlah workshop pembangunan pariwisata bahari	0 kali	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000	PRL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	- Pembangunan pariwisata di permukaan laut (ponton wisata)	Jumlah panwisata di permukaan laut (ponton wisata) yang tersedia	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.450.000.000	2	2.900.000.000	3	4.350.000.000	PRL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	- Promosi pariwisata bahari	Jumlah lokasi yang dipromosikan di provinsi Bengkulu	0 lokasi	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	PRL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	- Transplantasi Terumbu Karang di Prov. Bengkulu	Jumlah wadah transplantasi terumbu karang	0 unit	20	70.500.000	0	0	70	175.000.000	70	175.000.000	70	180.000.000	70	180.000.000	300	780.500.000	PRL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	- Pameran Hari Nusantara	Jumlah pameran Hari Nusantara	0 kali	0	0	0	0	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	4	480.000.000	PRL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	- Peringatan Hari Nusantara	Jumlah peringatan Hari Nusantara yang	1 kali	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	PRL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	2 Bimbingan pelaku usaha wisata bahari	Jumlah lokasi dan bimbingan kelembagaan wisata bahari	0 lokasi	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	PRL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	3 Pengembangan pariwisata bahari di Pulau Tikus																					
	- Penyusunan FS, MP, DED Pulau Tikus	Jumlah dokumen FS, MP, DED Pulau Tikus yang dihasilkan	dokumen	0	0	0	0	3	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	3	1.500.000.000	PRL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	- Penyusunan Dokumen AMDAL P. Tikus	Jumlah dokumen AMDAL P. Tikus yang dihasilkan	dokumen	0	0	0	0	0	0	1	700.000.000	0	0	0	0	1	700.000.000	PRL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	4 Pengelolaan wilayah pesisir mendukung pariwisata bahari																					
	- Penanaman Mangrove di Pesisir Kawasan Konservasi Perairan	Jumlah mangrove yang ditanam	batang	0	0	0	0	5.000	100.000.000	10.000	217.000.000	10.000	245.000.000	10.000	275.000.000	35.000	837.000.000	BPSPFL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	- Pembinaan masyarakat sadar wisata	Jumlah Lokasi pembinaan masyarakat sadar wisata	kab/kota	0	0	0	0	7	100.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	28	700.000.000	BPSPFL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	- Upaya pelestarian penyul bertelur	Jumlah kelompok pelestari penyul	0 kelompok	1	0	0	0	3	200.000.000	3	300.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	13	1.300.000.000	BPSPFL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
	- Penanaman vegetasi di Wilayah pesisir	Jumlah wilayah pesisir yang direhabilitasi	0 lokasi	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	BPSPFL	APBD	Visi 2020 Wonderful Bengkulu		
Persentase pengelolaan ruang laut yang dikembangkan	Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan ruang laut yang dikembangkan (%)		15	17	0	20	2.294.950.000	23	2.145.300.000	25	7.765.000.000	27	2.815.000.000	30	2.765.000.000	30	17.785.250.000			Renstra	
		Persentase pemanfaatan ruang laut yang dikembangkan (%)		15	15	20		21		23		25		25		25						

(%)																										
Persentase pemanfaatan ruang laut yang dikembangkan (%)	1 Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																									
	- Penyusunan RZWP3K	Jumlah dokumen RZWP3K dan KLHS yang dihasilkan	dokumen	0	0	2	1.944.950.000	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2.444.950.000	PRL	APBD	Penguatan Komoditi Unggulan Agro-Maritim dan Hilirisasi	
	- Penyusunan Perda RZWP3K	Jumlah dokumen PERDA RZWP3K yang dihasilkan	dokumen	0	0	0	0	1	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	800.000.000	PRL	APBD		
	- Pengembangan pariwisata bahari berbasis Konservasi di P. Enggano	Jumlah DED pariwisata bahari berbasis Konservasi di P. Enggano yang tersedia	dokumen	0	0	0	0	1	150.000.000												1	150.000.000	PRL	APBD		
		Jumlah tracking mangrove dan sarpras di pariwisata bahari berbasis Konservasi di P. Enggano	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	5	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.000.000.000	BPSPL	DAK/ APBD		
	- Kajian Kondisi Eksistensi Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Jumlah dokumen hasil kajian Kondisi Eksistensi Kawasan Konservasi Perairan Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2	400.000.000	BPSPL	APBD		
	- Reklamasi Pulau Tikus	Jumlah wilayah yang direklamasi	0 pulau	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	3	9.000.000.000	PRL	APBD							
	2 Penerapan Sistem Informasi Mitigasi Adaptasi dan perubahan Iklim Lingkungan (SIMAIL) untuk Nelayan	Jumlah lokasi SIMAIL yang diterapkan	Kab/kota pesisir	0	0	0	0	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	8	1.100.000.000	PRL	APBD							Transposisi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
	3 Pengembangan kelembagaan dan IPTEK masyarakat pesisir																									
	- Fasilitas lembaga keuangan usaha KP dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat pesisir	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	orang	0	0	0	0	30	150.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	120	300.000.000	PRL	APBD							Penguatan Komoditi Unggulan Agro-Maritim dan Hilirisasi
- Workshop potensi industri garam di Provinsi Bengkulu	Jumlah kegiatan mitra bahari	0 kegiatan	0	0	0	0	3	165.300.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	12	345.300.000	PRL	APBD								
- Pelatihan Wanita Nelayan (produk olahan KP)	Jumlah wanita yang dilatih	orang	0	0	0	0	30	50.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	120	275.000.000	PRL	APBD						Penguatan Komoditi Unggulan Agro-Maritim dan Hilirisasi		
- Sosialisasi Kawasan Konservasi perairan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang diadakan Kawasan Konservasi perairan Daerah	30 orang	0	0	0	0	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	120	200.000.000	PRL	APBD								
- Sosialisasi jenis-jenis ikan yang dilindungi	Jumlah peserta sosialisasi jenis-jenis ikan yang dilindungi yang diadakan	0 orang	0	0	60	75.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	300	395.000.000	PRL	APBD								
4 Pameran Hari Nusantara	Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hari Nusantara	0 kali	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	PRL	APBD								
5 Peringatan Hari Nusantara	Jumlah Peringatan Hari Nusantara yang	1 kali	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	PRL	APBD								
6 Rehabilitasi Vegetasi di Pulau Tikus Kota Bengkulu	Jumlah Wilayah pesisir yang direhabilitasi	0 lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	PRL	APBD						Visit 2020 Wonderful Bengkulu		
7 Penanaman Bakau di Wilayah Pesisir	Jumlah bakau yang ditanam	0 batang	0	0	5000	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	75.000.000	PRL	APBD								
Program Perlindungan dan Konservasi SDA							210.200.000				540.800.000															
1 Pencadangan Kawasan Konservasi Pulau Tikus	Tersedianya dokumen perencanaan pencadangan kawasan konservasi P. Tikus	dokumen	0	0	1	96.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	96.400.000	BPSPL	APBD							Visit 2020 Wonderful Bengkulu	
2 Peningkatan iptek tentang perlindungan dan konservasi SDA																										
- Pelatihan Konservasi terumbu karang	Jumlah peserta sosialisasi Konservasi terumbu karang yang diadakan	60 orang	60	65.800.000	60	146.500.000	60	71.500.000	60	75.000.000	60	75.000.000	60	75.000.000	360	508.800.000	BPSPL	APBD							Penguatan Komoditi Unggulan Agro-Maritim dan Hilirisasi	
- Pembinaan Lokasi Penyubtelur	Lokasi penyubtelur yang dibina	7 kab/kota	7	70.500.000	7	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14	170.500.000	BPSPL	APBD							Transposisi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
- Sertifikasi Selam untuk Masyarakat Pesisir	Jumlah masyarakat pesisir yang mempunyai sertifikat selam	0 orang	0	0	20	197.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	197.900.000	BPSPL	APBD							Penguatan Komoditi Unggulan Agro-Maritim dan Hilirisasi	
- Sosialisasi Kawasan Konservasi	Jumlah peserta Sosialisasi Kawasan Konservasi yang diadakan	orang	0	0	0	0	60	80.000.000	30	40.000.000	60	80.000.000	60	80.000.000	210	280.000.000	BPSPL	APBD								
- Transplantasi Terumbu Karang di KKPD	Jumlah wadah transplantasi Terumbu Karang di KKPD	0 unit	20	73.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	73.900.000	PRL	APBD							Visit 2020 Wonderful Bengkulu	
Persentase penyelesaian perkara/kasus pelanggaran perkarakuas pelanggaran perkarakuas	Persentase penyelesaian perkara/kasus pelanggaran kelautan dan perikanan (%)	100	100	244.400.000	100	275.450.000	100	680.000.000	100	675.000.000	100	821.000.000	100	715.000.000	100	3.410.850.000									RENSTRA	
Frekuensi pengawasan pelaku usaha kelautan perikanan (kali)	Frekuensi pengawasan pelaku usaha kelautan perikanan (kali)	5	8		10		10		15		20		20		83											
1 Peningkatan IPTEK bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan																										
- Rapat Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan	Jumlah rapat Forum Koord Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang dilaksanakan	2 rapat	2	65.800.000	2	100.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	56.000.000	2	55.000.000	12	376.800.000	PSDKP	APBD							Penguatan Komoditi Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi	
- Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan	0 orang	0	0	0	0	50	60.000.000	40	50.000.000	50	60.000.000	40	50.000.000	180	220.000.000	PSDKP	APBD								
- Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Kab/Kota	Lokasi pokmaswas yang dibina	0 Kab/Kota	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	50	275.000.000	PSDKP	APBD								
- Temu Koordinasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam setahun	Jumlah Temu Koordinasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam setahun	0 pertemuan	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	5	260.000.000	PSDKP	APBD								
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Sdkp	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan pengawasan Sdkp	0 orang	30	84.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	84.600.000	BPSPL	APBD								
2 Pengawasan pelaku usaha perikanan dan kelautan																										
- Operasi Pemantauan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Operasi Pemantauan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0 Kali	0	0	0	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	300.000.000	4	200.000.000	16	900.000.000	PSDKP	APBD								
- Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Lokasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan	0 Kab/kota pesisir	0	0	9	38.750.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	33	238.750.000	PSDKP	APBD								
- Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Lokasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan	0 Kab/Kota	0	0	5	36.700.000	10	70.000.000	10	70.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	45	326.700.000	PSDKP	APBD								
- Pengawasan Perikanan Budidaya dan Produk Hasil Perikanan	Lokasi pengawasan Perikanan Budidaya ikan dan Produk Hasil Perikanan	0 Kab/Kota	0	0	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	40	215.000.000	PSDKP	APBD							Transposisi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	
- Pengawasan Alat Tangkap yang dilarang dan Wilayah Konservasi yang Dilindungi	Jumlah lokasi pengawasan Alat Tangkap yang dilarang dan Wilayah Konservasi yang Dilindungi	0 kab/kota pesisir	0	0	0	0	7	50.000.000	7	50.000.000	7	55.000.000	7	55.000.000	28	210.000.000	PSDKP	APBD								
- Penerbitan kapal perikanan	Lokasi penerbitan kapal perikanan	0 Lokasi	0	0	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	8	210.000.000	PSDKP	APBD								

	- Operasi berkala surat izin penangkapan ikan	jumlah operasi berkala surat izin penangkapan ikan yang dilakukan	0 operasi	2	94.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	94.000.000	BPSPL	APBD	
3	Pengadaan Sarpras pengawasan kelautan dan perikanan																						
	- Pengadaan Kapal Pengawas	Jumlah Kapal Pengawas yang tersedia	0 Unit	0	0	0	0	1	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000.000	PSDKP	DAK	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Keteringgalan
	- Pembuatan Garasi Kapal Pengawas	Jumlah Garasi Kapal Pengawas yang tersedia	0 Unit	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	PSDKP	DAK	

Bengkulu, 13 Oktober 2017
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

IVAN SYAMSURIZAL, ST, MT
NIP. 197400528 200212 1 001